



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



**L
A
K
I
P**

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA**

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. LAKIP Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LAKIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Ditetapkan di Sungailiat
pada tanggal : Januari 2024

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka



ROMLAN, S. Ag
PEMBINA, IV/a
NIP. 19781029 200604 1 008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun sebagai tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Peraturan Presiden tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan suatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Oleh karena itu, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka sebagai unsur penyelenggara kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, harus pula mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumber daya dalam bentuk penyampaian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8 Seri D) tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang ditetapkan, sebagaimana pada Struktur Organisasi terdiri dari:

- a. Kepala Badan,
- b. Sekretaris yang membawahi 2 Sub Bagian,
- c. Bidang terdiri dari 3 Bidang, masing-masing bidang membawahi 2 subbidang.

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini merupakan wujud akuntabilitas pencapaian kinerja dari pelaksanaan Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2021-2023 dan Rencana Kinerja Tahun 2023 yang telah ditetapkan melalui Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Penyusunan laporan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini pada hakekatnya

merupakan kewajiban dan upaya untuk memberikan penjelasan mengenai akuntabilitas dan responsibilitas terhadap kinerja yang telah dilakukan selama Tahun 2023. Hal ini mengingat pelaporan akuntabilitas kinerja merupakan suatu keharusan manajemen pemerintahan negara dan implementasi berbagai kebijakan negara yang menitikberatkan pada upaya peningkatan kepercayaan publik dan perwujudan pemerintahan yang baik (good governance), sebagaimana termuat dalam TAP MPR Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme yang ditindaklanjuti dengan UU Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

Seiring dengan upaya merealisasikan terwujudnya Visi Misi Kabupaten Bangka maka ditetapkan Sasaran Strategis sebagai berikut:

1. Sasaran Pertama : Meningkatnya Wawasan Kebangsaan;
2. Sasaran Kedua : Meningkatkan Kesadaran Politik dan Organisasi Masyarakat.
3. Sasaran Ketiga : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol

Program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini merupakan upaya untuk mewujudkan tercapainya tujuan dan sasaran, yang tertuang dalam Rencana Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023, serta dalam rangka menjawab isu-isu strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Berdasarkan uraian pada batang tubuh Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2023, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut :

1. Capaian indikator kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2023 termasuk berhasil dengan kategori sangat baik.

2. Kategori penilaian keberhasilan capaian 2 (dua) indikator kinerja seluruhnya tercapai dengan kategori sangat baik (sebesar $\geq 80\%$).
3. Anggaran program yang menunjang pencapaian 3 (tiga) sasaran strategis dan 3 (tiga) indikator kinerja Selanjutnya, guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, ada beberapa hal yang perlu dilakukan secara umum, antara lain :
 - a. Meningkatkan kualitas perencanaan agar dokumen perencanaan yang disusun dapat digunakan dan dapat mengurangi / keraguan dalam pelaksanaan kegiatan, sehingga sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
 - b. Menggunakan upaya pemecahan masalah dalam dokumen ini sebagai strategi peningkatan capaian kinerja pada pelaksanaan program / kegiatan tahun selanjutnya.
 - c. Memanfaatkan hasil evaluasi kinerja sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program/kegiatan.
 - d. Memberdayakan sumber daya yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka secara menyeluruh, efektif, dan efisien.
 - e. Memperkuat komitmen dari semua bidang untuk meningkatkan kinerjanya.

Daftar Isi

Kata Pengantar	3
Ikhtisar Eksekutif	4
Daftar Isi	7

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

1.1 Latar Belakang.....	8
1.2 Dasar Hukum.....	9
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.....	10

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi.....	12
1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	17
1.3 Isu – Isu Strategis.....	18
1.4 Keadaan Pegawai	19
1.5 Sarana dan Prasarana.....	21
1.6 Keuangan.....	24
1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023	25

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis.....	27
2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah	28
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah.....	29
2.1.3 Strategi, program dan kegiatan	30
2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023	34

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI.....39

B. ANALISIS AKUNTABILITAS KINERJA

a. Perbandingan antara target dan realisasi tahun ini.....	41
b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dan tahun lalu	53
c. Perbandingan Realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah	54
d. Membandingkan Realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional.....	55
e. Analisis Penyebab keberhasilan/kegagalan dan alternatif solusi... ..	56
f. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya... ..	58
g. Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang menunjang Pencapaian Kinerja	60
C. REALISASI ANGGARAN.....	85

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan.....	100
B. Langkah ke Depan	101
C. Tindak Lanjut yang dilakukan dan Pencapaian Kinerja	102

BAB V LAMPIRAN

Pendahuluan**A. Latar Belakang****1.1 Latar Belakang**

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah pemerintahan yang baik (*good governance*) di Indonesia.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik tahun 2023, diharapkan dapat:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.
2. Mendorong Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugas dan fungsinya secara baik dan benar yang didasarkan pada peraturan perundangan, kebijakan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
3. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka untuk meningkatkan kinerjanya.
4. Memberikan kepercayaan kepada masyarakat terhadap Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka di dalam pelaksanaan program/kegiatan dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.

1.2 Dasar Hukum

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2023 disusun berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan sebagai berikut:

- a. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014, tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
- f. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025
- h. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 – 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2020 Nomor 9 seri D);

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangka;
- j. Peraturan Bupati Bangka Nomor 17 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 17 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bangka Nomor 8 Tahun 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8);

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan laporan kinerja Instansi Pemerintah ini adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban yang dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka selama tahun anggaran 2023.

Tujuan dari penyusunan laporan tahunan ini adalah sebagai bahan masukan untuk mengevaluasi seluruh rangkaian kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, sehingga dapat meningkatkan kinerja untuk tahun pelaksanaan berikutnya.

1.4 Sistematika Laporan Kinerja Instransi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2023 ini disusun berdasarkan Program dan Kegiatan yang tercantum dalam DPA Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun Anggaran 2023.

Adapun sistematika LAKIP sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang : Bab ini menjelaskan Latar Belakang, Dasar Hukum, Maksud dan Tujuan, Tugas, Fungsi Pokok Fungsi dan sistematika penyusunan Dokumen Laporan Kinerja Perangkat daerah
- B. Gambaran Umum Organisasi
Penjelasan Umum Organisasi yang menjelaskan Fungsi dan Kewenangan

serta Struktur Organisasi dengan dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama yang sedang dihadapi organisasi.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, dan perjanjian kinerja. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama yang ingin diraih instansi pada tahun yang bersangkutan serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi Kepada Daerah.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja

Pada sub bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisa capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)
5. Analisa penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan.
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan simpulan secara umum tentang pencapaian kinerja organisasi serta langkah dimasa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya

LAMPIRAN :

Berisi Perjanjian Kinerja dan lain – lain yang dianggap perlu

1. Perjanjian Kinerja Induk dan Perubahan
2. Dokumen Lain yang dianggap perlu

B. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

1.1 Cascading Kinerja dan Struktur Organisasi

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka merupakan instansi pemerintah sebagai unsur pendukung tugas Bupati dalam urusan Pemerintahan dibidang kesatuan bangsa dan politik sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 7 Seri D), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8 Seri D) tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik yang terdiri dari 1 Sekretariat dan 3 Bidang . Sekretariat terdiri atas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dan Analisis Keuangan Pusat dan Daerah (Fungsional AKPD merangkap perencanaan) , sedangkan Kesatuan Bangsa Terdiri dari Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan , Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Masyarakat dan Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik.

Adapun susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka guna melaksanakan Tugas dan Fungsi tersebut terdiri dari :

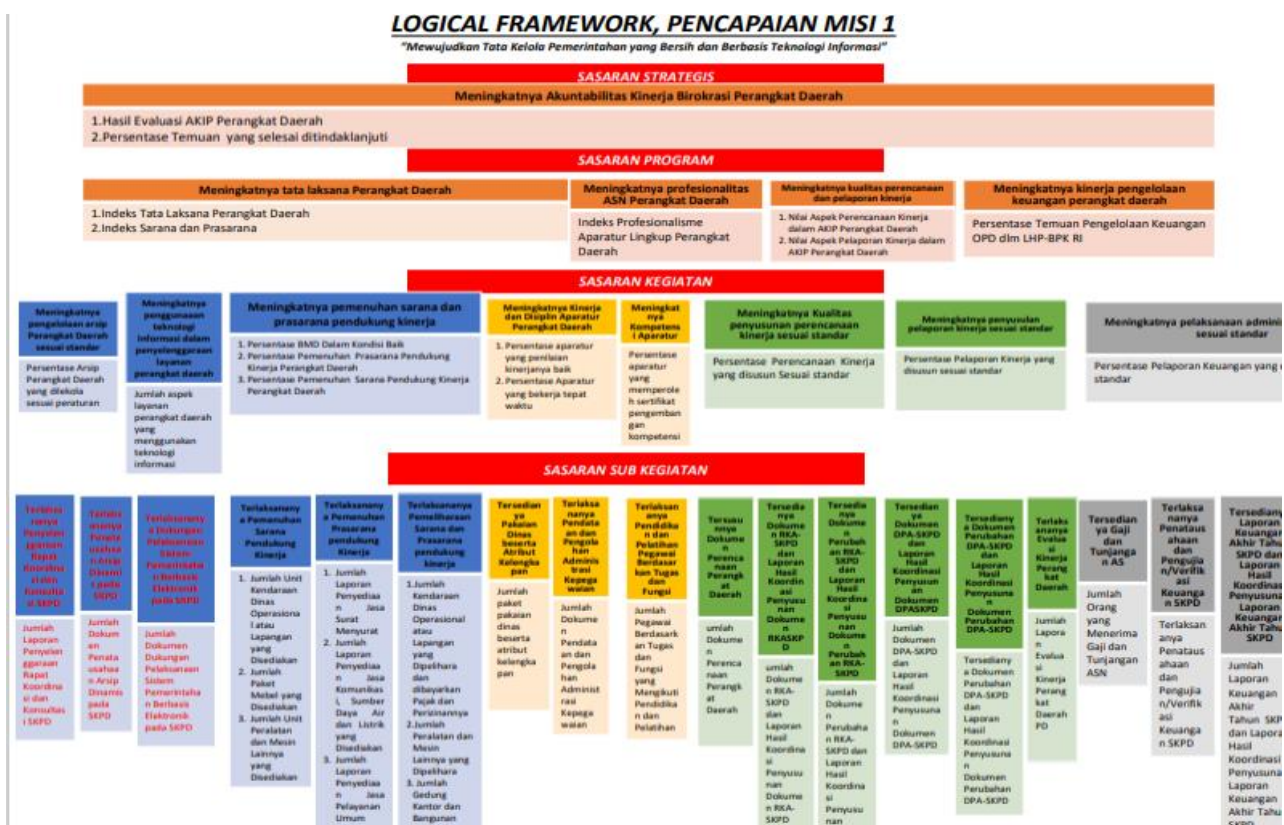
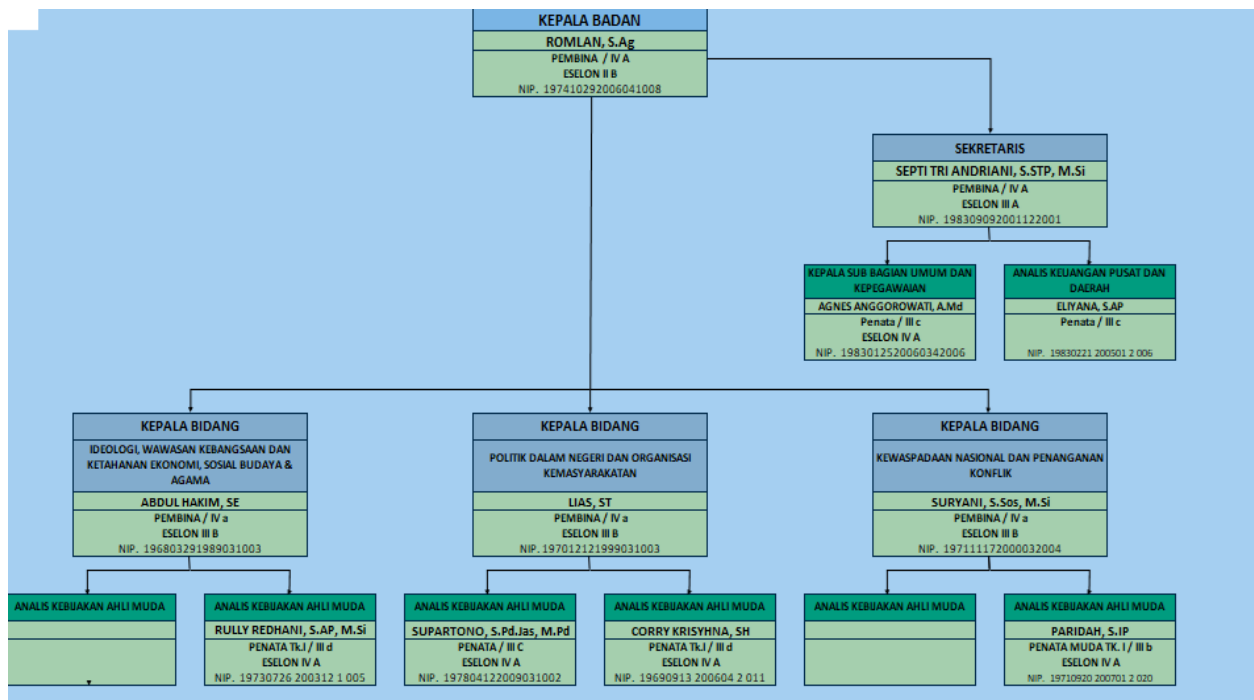
- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat terdiri dari;
 1. Kasubbag Umum dan Kepegawaian

- 2. Jabatan Fungsional
- c. Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama yang terdiri dari :
 - 1. Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Politik Dalam Negeri Dan Organisasi Kemasyarakatan yang terdiri dari :
 - 1. Jabatan Fungsional; dan
 - 2. Jabatan Fungsional.
- e. Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik yang terdiri dari:
 - 1. Jabatan Fungsional dan
 - 2. Jabatan Fungsional.

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 09 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Hubungan antara cascading kinerja, dan struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka sebagaimana tersaji dalam gambar berikut :

Bagan 1.1

**Susunan Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka**



LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN SASARAN MISI 4

"Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional"

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat

Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat

Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat

Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Persentase Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

SASARAN KEGIATAN

Terlaksananya Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol

Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Parpol dan Pembinaan Parpol

Terlaksananya pendidikan Politik Masyarakat

Persentase pendidikan Politik Masyarakat

Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

SASARAN SUB KEGIATAN

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN SASARAN MISI 4

"Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional"

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan

Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Persentase Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Meningkatnya Pembinaan sosial dan budaya

Persentase Cakupan Ketahanan sosial dan budaya

Meningkatnya kewaspadaan Penanganan konflik sosial

Persentase Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial

SASARAN KEGIATAN

Terlaksananya pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Persentase pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Terlaksananya Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan

Persentase Pelaksanaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan

Terlaksananya Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Persentase pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

SASARAN SUB KEGIATAN

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Diri, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

1.2 Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan

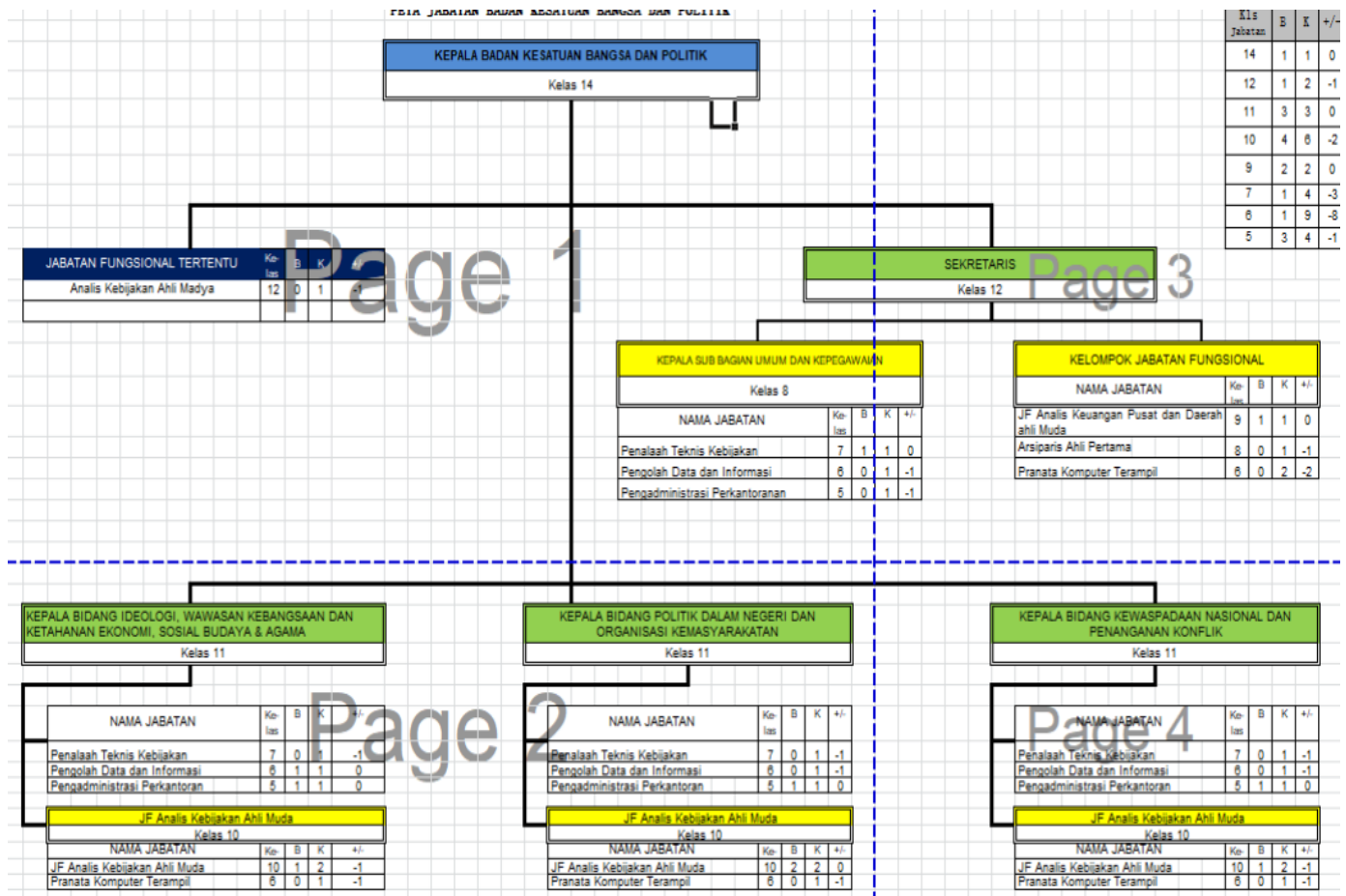
Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPJMD, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan Sebagaimana ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2021 Nomor 8 Seri D) tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesatuan bangsa dan politik di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, pembinaan dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
3. Pelaksanaan koordinasi di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah Kabupaten sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
4. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan ideologi Pancasila dan wawasan kebangsaan, penyelenggaraan politik dalam negeri dan kehidupan demokrasi, pemeliharaan ketahanan ekonomi, sosial dan budaya, pembinaan kerukunan antarsuku dan intra suku, umat beragama, ras, dan golongan lainnya, fasilitasi organisasi kemasyarakatan, serta pelaksanaan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik sosial di wilayah sesuai

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

5. Pelaksanaan fasilitasi forum koordinasi pimpinan daerah;
6. Pelaksanaan administrasi kesekretariatan Badan;
7. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

Gambar 1.2
Peta Jabatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka



1.3 Isu-Isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menemu kenali dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu Strategis yang melingkupi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, antara lain sebagai berikut:

1. Isu persatuan dan kesatuan nasional.
2. Kondisi keamanan dan ketertiban.

3. Deteksi dini potensi konflik.
4. Optimalisasi forum-forum komunikasi daerah.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sangat dipengaruhi oleh kondisi internal perangkat daerah. Diantara kondisi internal yang dapat berpengaruh adalah sebagai berikut:

1. Dukungan SDM yang masih terbatas dalam menangani masalah tertentu.
2. Dukungan sarana dan prasarana yang belum memadai.
3. Dukungan anggaran dalam pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan
4. Kerjasama (*networks*) antar perangkat daerah, organisasi politik dan masyarakat, serta mitra Aparatur Penegakan Hukum lainnya yang belum optimal.

Selain kondisi internal tersebut, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam menjalankan tugasnya juga menghadapi permasalahan di luar kewenangannya, yang bagaimanapun juga dapat mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsinya. Diantara permasalahan tersebut adalah meningkatnya jumlah pendatang dan WNA yang bekerja di wilayah Kabupaten Bangka.

1.4 Keadaan Pegawai

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka didukung oleh sumber daya aparatur yang berjumlah 34 Orang terdiri dari 16 orang PNS dan 18 orang Pegawai Tidak Tetap (PTT). Jumlah dan komposisi pegawai Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka dapat dilihat pada Tabel berikut:

Berdasarkan golongan, jabatan dan pendidikan, maka PNS pada Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Tabel 1.3

**Daftar Pegawai Berdasarkan Jabatan dan
Pangkat/Golongan Tahun 2023**

No	Jabatan	Pangkat /Gol	Jumlah
A	APARATUR SIPIL NEGARA		
1	Kepala Badan	Pembina	1 orang
2	Kepala Bidang	Pembina IV/A	3 orang
3	Kepala Sub Bagian	Penata /III c	1 orang
4	Jabatan Fungsional Tertentu	Penata /III c Penata TK I/III d Pembina / IV a	3 orang 1 orang 1 orang
5	Jabatan Fungsional Umum	Pengatur TK I Penata Muda/IIIa Penata Muda TK /IIIb Penata/III c	1 orang 2 orang 1 orang 1 orang

Tabel 1.4

**Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Eselon Tahun 2023**

No.	Eselon	A		B		Jumlah	Ket
		L	P	L	P		
1.	II	1				1	
2.	III	-	1	2	1	4	
3.	IV		1			1	
	Jumlah	1	2	2	1	6	

Tabel 1.5

**Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka Tahun 2023**

No	Sekretariat/Bidang	PNS			PHL			Total
		L	P	JML	L	P	JML	
1.	Sekretariat.	1	4	5	4	8	12	17
2.	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya, Agama	4	1	5	1	1	2	7
3.	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan	1	1	2	1	-	1	3
4.	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik	2	2	4	1	3	4	8
	Jumlah	8	8	16	7	12	19	35

Tabel 1.6
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	2	2	4
2.	S1	3	4	7
3.	D3	-	2	2
4.	SLTA	3	-	3

Tabel 1.7
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Golongan Tahun 2023

NO	Golongan	A	B	C	D	JUMLAH
1	I	-	-	-	-	-
2	II	-	-	-	1	1
3	III	2	1	5	1	9
4	IV	6	-	-	-	6
	Jumlah					16

Tabel 1.8
Jumlah Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Jabatan Tahun 2023

No.	Eselon	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1.	Struktural	3	3	6
2.	Jabatan Fungsional	2	3	5
3.	Tenaga Teknis Lainnya	-	-	-
4.	Arsiparis	-	-	-
5.	Staf/Administrasi/tata Usaha	-	-	-
	Jumlah	5	4	11

Tabel 1.9
Jumlah Pegawai Tidak Tetap
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Menurut Jenjang Pendidikan Tahun 2023

No.	Jenjang Pendidikan	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1.	S2	-	-	-
2.	S1	3	5	8
3.	D3	-	1	1
4.	SLTA	4	6	10

Tabel 1.10
Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin, dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN		PEGAWAI YANG ADA		JENISKELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI	JUMLAH	KUALIFIKASI	LAKI-LAKI	PEREMPUAN
A	JABATAN STRUKUTRAL	6		7		3	4
1	Kepala Badan	1	S1	1	S2	1	
2	Sekretaris Badan	1	S2	1	S2		1
3	Kepala Bidang	3	S1	1	3	2	2
4	Kepala Sub Bag Umum	1	D3	1	S1		1
B	JABATAN FUNGSIONAL	7		5		2	3
1	Analisis Keuangan Pusat/Daerah Ahli Muda	1	S1	1	S1		1
2	Analisis Kebijakan Ahli Muda	6	S1	4	S1	2	2
C	JABATAN PELAKSANA	12		3		2	1
1	Pengadministrasian Sarana dan Prasarana	1	D3	1	SMA	1	
2	Bendahara	1	SI	1	SI		1
3	Pengadministrasian Umum	10	SI	1	SLTA	1	
D	PHL	29		19		5	13
1	Administrasi Komputer	6		4	SI 2, D3 2	-	4
2	Administrasi	17		11	SMA 1,	1	6
2	Tenaga Kebersihan	2		1	SMA	-	1
3	Penjaga Kantor	2		1	SI	1	-
4	Supir	2		2	SMA	2	-

Berdasarkan data pada tabel 1.10 menunjukkan bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka hanya memiliki 16 orang ASN dan 19 Orang PHL Sedangkan untuk staf pelaksana ASN berjumlah 3 orang sehingga masih terjadi kekurangan pegawai ASN dalam membantu pelaksanaan kelancaran Kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka, selain jumlah ASN yang minim tingkat pendidikan dan kualitas pegawai juga masih relatif rendah. sehingga jumlah dan

kualitas/mutu SDM yang ada merupakan masalah yang utama dalam meningkatkan kinerja di Badan Kesbangpol.

1.5 Sarana dan Prasarana

Kondisi sarana dan prasarana Kantor yang dimiliki Badan Kesbangpol dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi berupa aset bergerak dan aset tidak bergerak secara umum sebagaimana tersaji pada tabel berikut :

Tabel 1.11
Daftar Aset/Sarana dan Prasarana dan
Kondisinya Per Desember 2023

NO	JENIS	KONDISI (B/KB/RB)	NILAI
1.	Tanah	1	330.336.000
2.	Gedung dan Bangunan	1	801.285.000
3.	Bangunan Tempat Tinggal	1	-
4.	Kendaraan	1	381.349.200
5.	Alat-alat kantor/rumah tangga	1	245.132.000
5.	Alat studio dan komunikasi	1	29.300.000
6.	Aset tetap Renovasi (ATR)	1	-
7.	BMD Ekstrakomptabel	1	473.000
8.	Komputer	1	138.050.000
JUMLAH			1.925.965.200,00

1. Tanah

Tanah yang dimiliki seluas 6.882 M² yang merupakan tanah bangunan gedung.

2. Bangunan

Bangunan gedung kantor terdiri dari dua unit dengan luas 258 M² yang terletak di Jalan ahmad Yani (Jalur Dua) Sungailiat-Bangka.

3. Inventaris/Peralatan Kantor

Inventaris dan peralatan kantor yang dimiliki terdiri dari meubelair, peralatan Komputer serta peralatan kantor lainnya yang diperoleh dari pengadaan APBD Kabupaten Bangka.

4. Kendaraan Dinas

Kendaraan dinas yang dimiliki per Januari 2023 sebanyak 7 unit yang terdiri dari 2 unit Kendaraan roda empat minibus serta 5 unit kendaraan roda dua.

Berdasarkan uraian sarana dan prasarana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka yaitu terdapat kendaraan Dinas roda empat sebanyak 2 unit yaitu kendaraan jabatan Kepala Badan dan Sekretaris dengan kondisi yang kurang baik sehingga perlu dilakukan pengadaan baru. Sedangkan perlengkapan kantor berupa meja, kursi, pendingin ruangan, lemari, filling kabinet, Komputer sudah tersedia dalam kondisi baik walaupun masih terdapat kekurangan. Untuk Perlengkapan kantor yang masih banyak kekurangan pada personal komputer. Rasio personal Komputer/Laptop yang tersedia dibanding jumlah pegawai mendekati 1 : 6 dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana belum memadai. Sedangkan sebanyak 80 % dari Komputer/Laptop yang sudah mengalami penghapusan masih digunakan walaupun dengan kondisi fisik yang tidak memungkinkan lagi untuk digunakan dikarenakan spesifikasinya tidak mendukung dalam pekerjaan yang 90 % menggunakan aplikasi sehingga pekerjaan yang dihasilkan lambat dan tidak tepat waktu.

1.6 Keuangan

Dukungan dana atau anggaran yang tersedia untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka pada tahun 2023 berasal dari APBD Kabupaten Bangka. Pada tahun anggaran 2023 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp. 9.760.033.280,00 dengan rincian belanja operasi Rp 9.474.274.150,00 dan belanja modal Rp 285.789.130,00 sebagaimana diubah dalam Peraturan Bupati Bangka Nomor 44 Tahun 2023 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka Tahun Anggaran 2023 yang disahkan mulai 01 November 2023,

menjadi sebesar Rp. 23,317,317,557,00 dengan rincian belanja operasi sebesar Rp 23.231.866.566,00 dan belanja modal Rp 85,450,991,00, yang mengalami kenaikan yang signifikan yang merupakan anggaran Hibah KPU, Bawaslu dan TNI Polri, selain itu juga diperuntukkan untuk mendukung pelaksanaan program yang berkaitan langsung dengan indikator sasaran strategis maupun program-program pendukung.

Tabel 1.12

Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Belanja Operasi		Belanja Modal		Jumlah
2022	Rp	5.193.759.728,00	Rp	118.769.000,00	Rp 5.312.528.728,00
2023	Rp	23.232.216.566,00	Rp	85,100,991,00	Rp 23.317.317.557,00

Dukungan Anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka. Terlihat pada tabel 1.9, untuk tahun 2022 dibanding tahun 2023 terdapat kenaikan anggaran belanja. Yang disebabkan adanya penambahan anggaran baik pada Hibah Persiapan pilkada 2024 sebanyak 40 % maupun anggaran untuk membiayai program/kegiatan yang lainnya dalam kelancaran fungsi Badan Kesbangpol.

1.7 Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2022

Tanggapan atas Laporan Hasil Evaluasi dimaksud :

A. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Tahun 2022 :

1. Hasil Penilaian AKIP per komponen :
 - a) Aspek Perencanaan Kinerja mendapat nilai 20,98 dari nilai maksimal 30.
 - b) Aspek Pengukuran Kinerja mendapat nilai 18,43 dari nilai maksimal sebesar 30.
 - c) Aspek Pelaporan Kinerja mendapat nilai 10,18 dari nilai maksimal 15.
 - d) Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapat nilai 17,75 dari nilai maksimal 25.
2. Catatan atas Penilaian AKIP Tahun 2022 :
 - a) Monitoring dan evaluasi hasil rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan agar dilakukan secara berkala dan seluruh proses monitoring didokumentasikan.

- b) Memanfaat Teknologi Informasi
- c) Menyusun Laporan Kinerja dengan sistematika penyusunan dan Penyajian Laporan Kinerja dan analisi capaian kinerja pada LAKIN harus sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.
- d) Menyempurnakan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja pada setiap Bidang melalui tahap verifikasi dan validasi untuk menjamin keakuratan data.

B. Tanggapan Atas Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Tahun 2022

Pada prinsipnya kami sependapat dengan Catatan Atas Penilaian AKIP Tahun 2022 dan akan ditindaklanjuti :

	URAIAN	TINDAKLANJUT			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Melakukan monitoring pencapaian kinerja secara periodik berdasarkan jadwal, mendokumentasikan hasil monitoring pencapaian kinerja, menindaklanjuti hasil monitoring pencapaian kinerja tersebut.	-	-	√	√
No	URAIAN	TINDAKLANJUT			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Koordinasi dengan Bappeda terkait Teknologi Informasi	-	-	√	-
	Memperbaiki Penyusunan Lakin dan Sub. Analisis Capaian Kinerja sesuai dengan Permenpan RB 53 Tahun 2014.	-	-	√	-
	Menyempurnakan Pengumpulan Data Kinerja setiap Bidang melalui tahap Verifikasi dan dan Validasi	-	-	√	√-

C. Tanggapan Atas Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Tahun 2022

Pada prinsipnya kami sependapat dengan Catatan Atas Penilaian AKIP Tahun 2022 dan akan ditindaklanjuti :

	URAIAN	TINDAKLANJUT			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Melakukan monitoring pencapaian kinerja secara periodik berdasarkan jadwal, mendokumentasikan hasil monitoring pencapaian kinerja, menindaklanjuti hasil monitoring pencapaian kinerja tersebut.	-	-	√	√
No	URAIAN	TINDAKLANJUT			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
	Koordinasi dengan Bappeda terkait Teknologi Informasi	-	-	√	-
	Memperbaiki Penyusunan Lakin dan Sub. Analisis Capaian Kinerja sesuai dengan Permenpan RB 53 Tahun 2014.	-	-	√	-
	Menyempurnakan Pengumpulan Data Kinerja setiap Bidang melalui tahap Verifikasi dan Validasi	-	-	√	√-

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis Renstra Bankesbangpol 2019-2023

Memasuki Tahun 2023 yang merupakan tahun berakhirnya RPJMD dan Renstra 2019-2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka menggunakan dasar pelaksanaan kegiatan dengan acuan Rencana Strategis (Renstra) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka merupakan manifestasi komitmen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dalam mendukung visi dan misi Pemerintah Kabupaten Bangka yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023. Sebagai bentuk pembangunan berkelanjutan, perumusan Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 tidak terlepas dari kesuksesan pencapaian target yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan periode sebelumnya (2014- 2018).

RPJMD Kabupaten Bangka merupakan dokumen landasan atau acuan pokok penyelenggaraan pemerintahan sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bangka sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bangka No. 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2019-2023.

Rencana Strategis (Renstra) adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah periode lima tahun. Renstra memuat tujuan, sasaran dan strategi bagi penyelenggaraan program dan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 ditetapkan melalui Peraturan Bupati Bangka nomor 8 tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bangka nomor 17 tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah tahun 2019-2023.

Berikut ini Tujuan Sasaran dan Indikator Badan Kesatuan Bangsa dan Politik 2019-2023 berdasarkan tabel di bawah ini :

**Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Jangka Menengah
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka**

NO.	TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUN					KONDISI AKHIR PERIODE RENSTRA				
				2019	2020	2021	2023	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	2	3	4	5	6	7	8					8
1	Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	100%	80%	80%	85%	90%	100%	70	62,5	78,43	80,36
2		Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	30%	30%	60%	65%	70%	94,34%	70%	100%	100%	100% -
3		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	CC	70,10 (BB)	70,10 (BB)	71,51 (BB)	71,51 (BB)	CC	70,10 (BB)	71,51 (BB)	67,34 (B)	71,51 (BB)

2.1.1 Visi dan Misi Kepala Daerah

RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 mempunyai Visi "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bangka yang SETARA (Bangka Sejahtera dan Mulia)". Sedangkan Misi Kabupaten Bangka adalah :

1. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Yang Bersih Dan Berbasis Teknologi Informasi
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berintegritas
3. Mewujudkan Pemerataan Pembangunan Infrastruktur Antar Wilayah
4. Mewujudkan Gerbang Kota Dan Pariwisata Berskala Internasional
5. Mewujudkan Perekonomian Daerah Yang Berdaya Saing Dan Berkelanjutan

Berdasarkan pemetaan visi misi Perubahan RPJMD Kabupaten Bangka Tahun 2019-2023 yang menjadi urusan dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka pada Misi ke empat yaitu "Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional". Guna mewujudkan Visi Bangka Setara dan Misi tersebut maka disusunlah sasaran strategis yang akan dicapai yaitu: Meningkatnya Wawasan Kebangsaan dan Menigkatnya Kesadaran Politik Masyarakat.

2.1.2 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Mengacu pada Visi dan Misi Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan, maka tujuan jangka menengah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka selama 5 tahun anggaran adalah:

Tabel 2.1
Tujuan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka

NO.	TUJUAN PD	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN				
			2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8
1	Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Persentase Penanganan Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	100%	100%	100%	100%	100%

Sasaran Strategis

Mengacu pada tujuan yang telah ditetapkan, maka sasaran yang hendak dicapai atau dihasilkan dalam kurun waktu lima tahun adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran Strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka 2019-2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET TAHUNAN					TARGET AKHIR RENSTRA
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	100%	80%	80%	85%	90%	90%
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	30%	60%	60%	65%	100%	100%
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	CC	70,10	70,10	70,10	71,51	71,51

Berdasarkan Tabel 8.1 target Tahunan badan Kesatuan Bangsa dan P oliitk mengalami kenaikan di tahun 2023 atau target akhir renstra dikarenakan pada tahun 2023 Pemerintah Kabupaten Bangka melakukan Pemilu dan Pilkada serentak 2024 seluruh Indonesia sehinga untuk target sasaran strategis pada Meningkatkan kesadaran politik masyarakat ditingkatkan menjadi 100% dibandingkan degan target Renstra 70%.

2.1.3 Strategi, Program dan Kegiatan dan Arah Kebijakan

Setelah menentukan tujuan dan sasaran, maka langkah selanjutnya perlu ditentukan bagaimana hal tersebut dapat dicapai. Cara mencapai tujuan dan sasaran merupakan strategi organisasi. Strategi pencapaian tujuan dan sasaran diupayakan dengan melaksanakan Program dan Kegiatan yang mendukung pencapaian sasaran dan tujuan.

Tabel 2.3
Sasaran Strategis dan Arah Kebijakan

NO	Tujuan	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	Terwujudnya Stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Peningkatan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan Peningkatan Ketahanan sosial dan budaya masyarakat Peningkatan kewaspadaan Penanganan konflik sosial	Penguatan implementasi wawasan kebangsaan dan persatuan dan kesatuan bangsa kepada masyarakat Peningkatan pembangunan karakter bangsa melalui gerakan revolusi mental. Penguatan kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan Penguatan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan dan penyalahgunaan narkoba Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap toleransi dan kerukunan beragama Fasilitasi Forum kemasyarakatan untuk meningkatkan kewaspadaan dan optimalisasi deteksi cegah dini. Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap pencegahan Penyakit Masyarakat (PEKAT) Penguatan Forum Komunikasi Masyarakat pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan Optimalisasi fungsi FORKOPIMDA Peningkatan pemantauan dan pendataan WNA/Orang asing di Kabupaten Bangka Pemetaan wilayah rawan keamanan dan ketertiban. Penguatan kerjasama dan jejaring dengan instansi terkait dalam mewujudkan kenyamanan dan ketertiban masyarakat.

		Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Peningkatan pendidikan politik masyarakat	Penguatan pemahaman dan kesadaran politik masyarakat
			Peningkatan pembinaan Organisasi kemasyarakata	Penguatan kualitas SDM Organisasi Politik
				Meningkatkan pengawasan Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL)
				Penguatan kualitas Sumber daya manusia Organisasi Masyarakat.
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan layanan pemerintahan yang akuntabel	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka	Peningkatan Kinerja dan Kemampuan Aparatur Pemerintah	Meningkatkan Kinerja dan Kemampuan Aparatur yang akuntabel.
				Penguatan Kompetensi pegawai
				Penyediaan Sarana dan Prasarana kerja

2.1.4 Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program dan Kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2023 maupun Program dan Kegiatan Pendukung tabel berikut :

Tabel 2.4
Program/Kegiatan terkait langsung pencapaian Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BERKURANG
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	I. Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1,165,500,000.00	1,447,262,900.00	281,762,900.00
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,165,500,000.00	1,447,262,900.00	281,762,900.00
		II. Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial Dan Budaya	214,000,000.00	179,116,725.00	(34,883,275.00)
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	214,000,000.00	179,116,725.00	(34,883,275.00)
		III. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitas Penanganan	158,650,700.00	157,884,850.00	(765,850.00)

		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	158,650,700.00	157,884,850.00	(765,850.00)
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	IV. Program Peningkatan Peran Partai Politik, Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4,023,089,213.00	18,449,903,722.00	14,426,814,509.00
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pilkada serta Pemantauan Situasi Politik	4,023,089,213.00	18,449,903,722.00	14,426,814,509.00
		V. Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	15,000,000.00	15,000,000.00	-
		Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	15,000,000.00	15,000,000.00	-
		Total Anggaran yang Berkaitan Langsung dengan Pencapaian Sasaran Strategis	5,576,239,913.00	20,249,168,197	14,672,928,284.00

Berdasarkan Tabel 2.4 menyatakan bahwa adanya penambahan anggaran yang signifikan pada anggaran perubahan 2023 dikarenakan Berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 September 2023 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota Tahun 2024 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi, Kabupaten wajib menganggarkan dana hibah Pilkada pada APBD Perubahan 2023 sebanyak 40 Persen, dan APBD 2024 sebanyak 60 persen. Sehingga Pemerintah Kabupaten Bangka telah mengalokasikan anggararan Hibah sebesar 40 % pada KPU Rp.11.329.297.200,-, Bawaslu sebesar Rp. 3.713.723.200,-, TNI 539.891.600,00 Dan Polri Rp. 1.731.207.200,00. Sedangkan untuk mencapai sasaran strategis juga mengalami hambatan disebabkan Pemerintah kabupaten Bangka mengalami defisit anggaran yang cukup besar sehingga terdapat indikator sub kegiatan yang mengalami rasionalisasi anggaran dalam mengurangi dampak defisit tersebut.

Tabel 2.5
Program/Kegiatan Pendukung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN	SEBELUM PERUBAHAN	SESUDAH PERUBAHAN	BERTAMBAH/BER KURANG
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Badan Kesbangpol	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4,183,793,367.00	3,068,149,360.00	(1,115,644,007.00)
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,000,000.00	36,792,479.00	4,792,479.00
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,201,114,362.00	2,191,574,976.00	(1,009,539,386.00)
		Administrasi Kepegawaian	49,750,000.00	20,377,360.00	(29,372,640.00)
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	206,820,000.00	295,911,966.00	89,091,966.00
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,069,130.00	85,450,991.00	(2,618,139.00)
		Penyediaan jasa penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308,509,875.00	316,311,588.00	7,801,713.00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297,530,000.00	121,730,000.00	(175,800,000.00)
Total Anggaran Pendukung			4,183,793,367.00	3,068,149,360.00	(1,115,644,007.00)

2.2 Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Dokumen tersebut memuat sasaran strategis, indikator kinerja, beserta target kinerja dan anggaran. Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Renstra, Renja, IKU, dan anggaran atau DPA.

Dari sasaran yang telah ditetapkan dan di jelaskan pada Tabel 2.3 maka di buatlah perjanjian kinerja sebagai dasar pelaksanaan kegiatan di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik antara Kepala Badan Kesbangpol dan Bupati Bangka yang ditanda tangani pada tanggal 30 Januari 2023 (terlampir), yaitu :

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	%	90
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	%	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Badan Kesbangpol	Nilai Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Kategori/Nilai	BB (71,51)

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	4.183.793.367,00	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.165 .500.000,00	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	4.023.089.213,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	15.000.000,00	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	214.000.000,00	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	158.650.700,00	APBD
TOTAL		9.760.033.280,00	

Pada tahun 2023, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka melakukan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perubahan Perjanjian Kinerja dilakukan karena adanya perubahan dan rasionalisasi anggaran. Perubahan Perjanjian Kinerja antara Kepala Badan Kesbangpol dan Pj. Bupati Bangka yang ditanda tangani pada tanggal 01 November 2023 adalah sebagai berikut:

No	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	%	90
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	%	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Badan Kesbangpol	Nilai Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Kategori/Nilai	BB (71,51)

No	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET.
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	3.068.149.360,00	APBD
2.	Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan	1.447.262.900,00	APBD
3.	Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik	18.449.903.722,00	APBD
4.	Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	15.000.000,00	APBD
5.	Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya	179.116.725,00	APBD
6.	Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial	157.884.850,00	APBD
TOTAL		23.317.317.557,00	

Keterangan :

1. Berdasarkan Perjanjian Kinerja dan Perjanjian Kinerja Perubahan pada tabel diatas menyatakan bahwa target yang ditentukan pada Perjanjian Kinerja 2023 beberapa dengan target Renstra, perbedaan tersebut pada **Sasaran Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat** dengan target Renstra 70 persen sedangkan untuk target Perjanjian Kinerja 100 % hal ini disebabkan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik akan melakukan persiapan pemilu dan pilkada serentak 2024. Sehingga anggaran induk maupun anggaran perubahan

dialokasikan pemerintah Kabupaten Bangka kepada Badan Kesbangpol untuk persiapan pemilu yang terdiri dari pemantauan persiapan pemilu, Pilkada, sosialisasi pemilih pemula serta anggaran Hibah KPU, BAWASLU dan TNI, POLRI.

2. Terdapat sub kegiatan yang mengalami perubahan anggaran disebabkan defisit anggaran sehingga terdapat indikator kegiatan yang tidak bisa tercapai disebabkan adanya rasionalisasi anggaran.

BAB 3

Akuntabilitas Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka tahun 2023 ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Pada bab ini disajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Laporan Kinerja adalah pewujudan pertanggung jawaban atas pencapaian visi dan misi organisasi yang telah ditetapkan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Untuk itu, Evaluasi terhadap Kinerja melalui mekanisme pertanggungjawaban perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan Program/kegiatan berimplikasi terhadap kinerja atau pencapaian sasaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Mamuju. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
7. Analisis program/ kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

Untuk skala penilaian terhadap kinerja pemerintah, menggunakan pijakan Permendagri No. 86 tahun 2017 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata cara Penyusunan, Pengendalian, Dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dengan kriteria sebagai berikut;

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja
1	$91\% \leq 100\%$	Sangat Tinggi
2	$76\% \leq 90\%$	Tinggi
3	$66\% \leq 75\%$	Sedang
4	$51\% \leq 65\%$	Rendah
5	$\leq 50\%$	Sangat Rendah

Sumber : Permendagri No. 86 Tahun 2017

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut:

Perbandingan dan analisis capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka adalah sebagai berikut:

A. Capaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan indikator kinerja sasaran yang Secara rinci dari capaian masing-masing indikator kinerja sasaran tahun 2023 dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.1
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	2023			
				Target Tahunan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3	4	6	7	8	9
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	1.1 Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	%	90	90	72,33	80,36
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	2.1 Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	%	100	100	100	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Nilai	BB (71,51)	BB (71,51)	BB (71,51)	

B. Analisis Capaian Kinerja Tahun 2023

Pelaksanaan program/kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka tahun 2023 sesuai dengan penetapan kinerja yang telah dilakukan, maka untuk mengevaluasi sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dapat diketahui dengan melihat indikator-indikator yang terkait dengan sasaran, program dan kegiatan yang telah ditetapkan. Berdasarkan format Pengukuran Kinerja yang telah dibuat dengan merujuk pada Indikator Kinerja Utama dan RPJMD instansi maka capaian Pengukuran Kinerja Kegiatan Tahun 2023 dari badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dapat dijelaskan melalui uraian berikut di bawah ini :

- **Sasaran 4 RPJMD “Meningkatnya Jumlah Uang yang dibelanjakan Wisatawan”**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik turut serta membantu ketercapaian sasaran Daerah ke 4 yaitu Meningkatkan Jumlah Uang yang dibelanjakan Wisatawan dengan Tujuan Meningkatkan Pembangunan Sektor Wisata dalam mendukung pertumbuhan Ekonomi yang termasuk ke Misi 4 RPJMD yaitu mewujudkan gerbang kota dan Pariwisata berskala Internasional. Dalam mewujudkan misi 4 tersebut melalui Aspek stabilitas Ketentraman dan Ketertiban Umum inilah yang menjadi sasaran Badan Kesbangpol sebagai OPD pendukung, melalui upaya-upaya pencegahan konflik sosial yang dilaksanakan antara lain dengan Pencegahan dan Penanganan Potensi Konflik Sosial yang bekerjasama dengan Tim Forkopimda, Melaksanakan Kewaspadaan Dini Masyarakat melalui kerjasama dengan Kecamatan/Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka, Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan, Forum Kerukunan Umat Beragama dan Fasilitasi Forum Koordinasi Pimpinan Daerah dalam pencegahan potensi konflik yang ada di Kabupaten Bangka. Sehingga apabila stabilitas ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Bangka meningkat disertai dengan meningkatnya Jumlah Wisatawan yang datang ke Kabupaten Bangka sehingga jumlah jumlah uang yang dibelanjakan wisatawan akan terjadi peningkatan.

- **Sasaran Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Tahun 2023**

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik memiliki 3 sasaran Kinerja.

a. Perbandingan antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun ini :

Dalam pencapaian kinerja pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dihitung berdasarkan 3 sasaran yaitu :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	90	72,33	80,36
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	100	100	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	BB (71,51)	BB (71,51)	100

Sasaran 1 "Meningkatnya Wawasan Kebangsaan"

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tiga sasaran strategis dan tiga Indikator kinerja. Pada tahun 2023, indikator kinerja untuk **sasaran Meningkatkan Wawasan Kebangsaan** diukur dengan indikator yaitu Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan, Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator sebagai berikut :

Pada Sasaran **Meningkatnya Wawasan Kebangsaan** dengan pencapaian 80, 36 % dengan target yang direncanakan 90%, ketercapaian pada sasaran tersebut didukung dengan 3 Program yaitu

1. **"Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan"** dengan Indikator Program yaitu Persentase Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan pencapaian sebesar 50 % dari target yang direncanakan sebesar 90%. Belum tercapainya target sasaran program dikarenakan terdapat sub kegiatan yang dilakukan rasionalisasi dan Efisiensi penggunaan anggaran disebabkan Pemerintah Kabupaten Bangka mengalami defisit anggaran yang signifikan pada pertengahan tahun 2023 serta tidak

diperkenalkannya dilaksanakan kegiatan berdasarkan konsultasi Kepala Badan Kesbangpol dengan kepala DPPKAD bahwa kegiatan yang diperbolehkan untuk dilaksanakan yaitu kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan persiapan pemilu dan pilkada sedangkan untuk pelaksanaan koordinasi wawasan kebangsaan tidak berhubungan dengan pelaksanaan pemilu dan pilkada sehingga ditunda pelaksanaannya. Capaian Indikator ini dihitung dari formula penghitungan yaitu persentase dari (Jumlah kegiatan Bidang wawasan kebangsaan yang terealisasi /Jumlah yang di rencanakan x 100%). Jumlah Kegiatan dari Sasaran Program ini sebanyak 2 sub Kegiatan tetapi yang dilaksanakan hanya 1 sub kegiatan yang terealisasi sedangkan 1 kegiatan tidak dilaksanakan. Sehingga pencapaiannya 50 %.

Tabel 3.2

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

N O	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Program penguatan ideologi pancasila dan karakter kebangsaan	Persentase Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	(Jumlah Pelajar/Paskibraka yang memahami wawasan kebangsaan /Jumlah yang di rencanakan X 100%) + (Jumlah peserta koordinasi yang memahami Wawasan Kebangsaan /Jumlah yang direncanakan X 100%) /2	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan

Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian program wawasan kebangsaan yaitu

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan dengan *Indikator Kegiatan yaitu "Persentase pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan"* .dengan pencapaian sebesar 50 % dari target 100%. pada kegiatan terdapat 2 sub kegiatan yaitu

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan dengan indikator Sub kegiatan **"Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan"** Dengan target 30 orang. Tingkat pencapaian pada sub kegiatan tersebut mencapai 100 persen dari target 100 persen yang direncanakan. Pencapaian dihitung dari jumlah siswa/paskibaka yang memahami wawasan kebangsaan/Jumlah Paskibraka yang direncanakan x 100%. Siswa atau paskibraka yang dipilih yaitu siswa yang melalui berbagai tes yang terdiri dari tes fisik, kesehatan, kesamaptan, PBB, Wawasan kebangsaan dan Kepribadian.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan dengan indikator **" Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah"** dengan target **40 orang**. Pada sub kegiatan pelaksanaan koordinasi tidak dilaksanakan sehingga pencapaian 0%. Perhitungan kinerja pada sub kegiatan tersebut yaitu jumlah peserta yang memahami ideologi dan wawasan kebangsaan/target peserta yang direncanakan x 100%. Pelaksanaan kegiatan pada sub tersebut direncanakan oleh Pengguna anggaran di laksanakan pada triwulan ke IV dikarenakan pada triwulan I sd III yaitu tepatnya dari bulan Januari s,d September Badan Kesbangpol fokus dalam pelaksanaan pembinaan wawasan kebangsaan bagi paskibraka dan persiapan peringatan pengibaran bendera 17 Agustus, dikarenakan kurangnya jumlah SDM di Badan kesbangpol yang membantu pelaksanaan kegiatan sehingga diprioritaskan dahulu kegiatan paskibraka. Akan tetapi pada akhir bulan juli Kabupaten Bangka mengalami defisit anggaran yang signifikan menyebabkan terdapatnya indikator sub kegiatan yang mengalami rasionalisasi. Untuk sub kegiatan tersebut masih di pertahankan tetapi pada triwulan ke 4 tepat nya bulan November 2023 Badan Kesbangpol melakukan konsultasi dengan kepala DPPKD mengenai kegiatan tersebut, tetapi dari hasil konsultasi tersebut menyatakan bahwa Kabupaten Bangka diharuskan efisiensi anggaran dan kegiatan yang diperbolehkan untuk dilaksanakan

yang berhubungan dengan kelancaran pelaksanaan persiapan pemilu dan pilkada 2024 sedangkan untuk sub kegiatan tersebut tidak berhubungan dengan persiapan pelaksanaan pemilu dan pilkada serentak 2024 sehingga ditunda pelaksanaannya.

Adapun realisasi Program, Kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tabel berikut:

Tabel 3.3

I	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	Persentase Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100%	50%	50%
		Persentase pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	100	50%	50%
1.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	30 Orang (Peserta Paskibraka Kabupaten)	30 Orang (Peserta Paskibraka Kabupaten)	100%
2.	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan) Peserta Seminar Wawasan Kebangsaan	Defisit Anggaran	0%

2. “Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya” dengan Indikator Program yaitu *Persentase Cakupan Ketahanan sosial dan budaya* dengan pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 100%.

Tabel 3.4

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

N O	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Program pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya	Persentase Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	(Jumlah Pembinaan Ketahanan Sosial dan Budaya yang dilaksanakan) / Jumlah Pembinaan yang direncanakan x 100%	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan

Sedangkan kegiatan dan sub kegiatan yang mendukung pencapaian pembinaan dan pengembangan ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya yaitu

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya dengan pencapaian sebesar 100 % dari target 100% yang direncanakan.

Pada pencapaian realisasi kegiatan tersebut didukung dengan sub kegiatan **"Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah"** dengan indikator *"Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah"* dengan target awal yang direncanakan sebanyak 3 target indikator yaitu : Sosialisasi Satgas Narkotika dengan 24 orang dan Sosialisasi P4GN dengan target 40 orang tidak dapat dilaksanakan dikarenakan Badan Kesbangpol melakukan Rasionalisasi anggaran sebesar 300.000.000 sehingga salah satu sub kegiatan tersebut yang mengalami rasionalisasi anggaran, akan tetapi untuk sub kegiatan dengan target 1 forum tidak mengalami rasionalisasi anggaran sehingga kegiatan tersebut dapat dilaksanakan dan realisasi mencapai 100%.

Adapun realisasi Program, Kegiatan dan sub kegiatan berdasarkan tabel berikut :

Tabel 3.5

II.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	Persentase Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	100%	100%	100%
II	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	100%	100%	100%
1.	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan	24 Orang Satgas Anti Narkotika	Rasionalisasi Anggaran	0%

	Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang perempuan) peserta Sosialisasi P4GN	Rasionalisasi Anggaran	0%
			1 Forum	1 Forum	100%

3. **“Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial”** dengan Indikator Program yaitu Persentase Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial dengan pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 100%. Pada Tahun 2023 dari bulan Januari sampai Desember 2023 terjadinya Potensi konflik sebanyak 63 kasus, sedangkan jumlah penanganan konflik yang diselesaikan berjumlah 63 kasus, sehingga pencapaian 100 %. Dalam melakukan pencegahan atau penanganan Konflik sosial di Kabupaten Bangka Badan kesbangpol bekerjasama dengan Tim Inteligen dan FKDM yang ada di Kecamatan dalam memberikan informasi yang cepat dan akurat.

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

N O	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Program peningkatan kewaspadaan nasional dan peningkatan kualitas dan fasilitas penanganan konflik sosial	Persentase Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	(Jumlah konflik yang ditangani/jumlah konflik yang terjadi yang direncanakan X 100%)	Bidang Wawasan Nasional

Untuk menunjang pencapaian tersebut didukung dengan kegiatan dan sub kegiatan yaitu :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial dengan indikator *“Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial”* . dengan pencapaian sebesar 67% dari target yang direncanakan sebesar 100%. Ketercapaian

pelaksanaan kegiatan tersebut terdapat 3 sub kegiatan yang mendukung yaitu :

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan indikator kinerja *"Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar"* dengan target kinerja 40 orang dengan realisasi 100 %. Formulasi perhitungan pada sub kegiatan tersebut yaitu jumlah orang yang dibina dalam menangani konflik sosial/jumlah orang yang yang direncanakan x 100%. Peserta yang diundang pada sosialisasi penanganan konflik sosial yaitu Lurah, Camat, Kasi Trantib. Keberhasilan capaian kinerja dilihat dari laporan harian/bulanan penanganan konflik yang diselesaikan di setiap kecamatan di Kabupaten Bangka.
- Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan indikator Kinerja yaitu *"Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah"* dengan target 2 Laporan. Pencapaian pada sub kegiatan ini mencapai 100 persen. Formulasi dalam penghitungan kinerja pada sub kegiatan tersebut yaitu Jumlah laporan yang di laporkan/jumlah laporan yang direncanakan X 100%. Badan Kesbangpol melakukan Monitoring Penanganan orang asing berkerjasama dengan tim Forkopimda seperti kejaksaan, pengadilan negeri, Imigrasi untuk memeriksa surat izin WNA yang tinggal dan bekerja di Indonoesia. Monitoring dilaksanakan 2 kali dalam satu tahun sehingga target 2 laporan.
- Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator *"Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi*

Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota" dengan target 1 Dokumen. Pada sub kegiatan ini tidak dilaksanakan sehingga realisasi 0%. Faktor yang menjadi penyebab tidak dilaksanakannya kegiatan ini yaitu Sulitnya melakukan proses pencairan keuangan pada bulan Agustus s.d akhir tahun dikarenakan pemerintah Kabupaten Bangka mengalami defisit anggaran sehingga setiap OPD diwajibkan melakukan efisiensi anggaran sehingga kegiatan yang wajib dilaksanakan dan dilakukan proses pencairan yang Urgen seperti Belanja rutin dan kegiatan yang berhubungan dengan kelancaran persiapan pemilu dan pilkada 2024.

Tabel 3.6

	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Persentase Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	100%	100%	100%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Pemantauan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	100%	67%	67%
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	<i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	<i>40 orang peserta Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>40 orang peserta Penanganan Konflik Sosial</i>	<i>100%</i>
	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah</i>	<i>2 Laporan (Pemantauan Orang Asing)</i>	<i>2 Laporan (Pemantauan Orang Asing)</i>	<i>100%</i>
	<i>Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>Defisit Anggaran</i>	<i>0%</i>

Sasaran 2 "Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat "

Untuk sasaran kedua Badan Kesatuan Bangsa dan Politik "Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat' sudah memenuhi target yang ditetapkan atau sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Adanya kenaikan target yang terjadi pada akhir periode renstra yaitu tahun 2023 sebesar 100 persen, sedangkan target kinerja di akhir renstra 70 persen. Kenaikan target kinerja pada tahun 2023 disebabkan pada tahun 2023 merupakan persiapan menghadapi pemilu dan pilkada serentak di Indonesia. Sehingga anggaran yang direncanakan yang berhubungan dengan peningkatan partisipasi politik di Kabupaten Bangka seperti kegiatan sosialisasi Partisipasi Politik bagi pemilih pemula dengan target SMA yang ada di Kabupaten Bangka, pemantauan persiapan pemilu dan pilkada 2024 serta anggaran hibah 40 persen bagi KPU, Bawaslu, TNI dan Polri. Itulah penyebab dilakukannya kenaikan target yang direncanakan. capaian untuk indikator kinerja ini sebesar 100%. Jumlah Kegiatan dari Sasaran Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat sebanyak 2 Kegiatan.

Tabel 3.7

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

N O	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Sumber Data
1	2	3	4	5
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	(Jumlah kegiatan bidang Politik dan Organisasi Masyarakat yang terealisasi / Jumlah yang direncanakan X 100%)	Bidang Ideologi, Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan

Pada Sasaran **Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat** dengan pencapaian realisasi sebesar 100 % sesuai target yang direncanakan 100%, ketercapaian pada sasaran tersebut didukung dengan 2 Program yaitu

1. **Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik"** indikator *"Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat"* dengan pencapaian sebesar 100 % dari target yang direncanakan sebesar 100%.

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

N O	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Program peningkatan peran partai politik dan lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan pengembangan etika serta budaya politik"	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	Jumlah Parpol/pemilih pemula yang mendapatkan pendidikan politik/jumlah target parpol/pemilih pemula yang direncanakan x 100%	Bidang Politik dan Ormas

Sedangkan keberhasilan pencapaian program adanya dukungan dari kegiatan dan sub kegiatan yang dilaksanakan yaitu

Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik dengan pencapaian realisasi sebesar 100%. Perhitungan pencapaian pada kegiatan adanya dukungan dari pelaksanaan sub kegiatan yaitu :

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan indikator kinerja yaitu ***"Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah"***.pencapaian kinerja pada sub kegiatan tersebut berdasarkan 3 target yaitu Sosialisasi Pemilih pemula dengan target peserta 40 orang yang merupakan siswa SMA dengan kriteria pemilih pemula yang berusia 17 tahun dan sudah mempunyai KTP. Dengan perhitungan jumlah siswa SMA yang mengerti pentingnya pendidikan politik pemilih pemula di bagi Jumlah siswa SMA pemilih pemula yang direncanakan x 100%. Dan terealisasi dengan pencapain 100%.

Untuk target kedua pada sub kegiatan tersebut yaitu 12 parpol dengan perhitungan

"Jumlah partai politik yang diverifikasi Bantuan Keuangan Parpol" dengan Target 12 Parpol yang mendapatkan suara x 100% dapat dilaksanakan dan terealisasi dengan capaian 100%.

Sedangkan untuk target ketiga yaitu **206.733 orang Pemilih pada PEMILU dan Pilkada (105.725 Laki-laki dan 101.008 Perempuan)**, target yang digunakan yaitu target pemilih pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2023 belum bisa dihitung jumlah pemilih dikarenakan pemilu dan pilkada akan dilaksanakan 2024. Sehingga pencapaian realisasi 100%.

- Sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah dengan indikator kinerja yaitu *"Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah"* dengan indikator kinerja1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu). Pencapaian pada sub kegiatan tersebut juga mendapatkan realisasi 100%. Pencapaian realisasi berdasarkan perhitungan : jumlah laporan pemantauan situasi politik yang disusun /target laporan yang di rencanakan x 100%. Pemantauan situasi politik persiapan pemilu dilaksanakan di seluruh Kecamatan/Desa/Kelurahan yang ada di Kabupaten Bangka. Pemantauan yang dilakukan yaitu Jumlah DPT setiap Kecamatan/Desa/kelurahan, KTP pemilih, pemantauan keamanan persiapan pemilu.

2. **Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan"** dengan indikator Kinerja *"Persentase Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan"* dengan pencapaian sebesar 70% dari target yang direncanakan sebesar 70 % sehingga tingkat realisasi pencapaian 100%. Pencapaian pada program tersebut dilakukan dengan perhitungan Jumlah ormas mendapatkan pembinaan dan pengawasan dari tahun 2019 s.d 2023 / Jumlah target ormas x 100% . Pembinaan dan pengawasan ormas sudah dilakukan dari tahun 2019 s.d 2023 berdasarkan target renstra 60 ormas. Dari tahun 2019 s.d 2022 sudah dilakukan pembinaan sebanyak 18 ormas sedangkan untuk tahun 2023 dilakukan pembinaan dan pengawasan 24

ormas. Sehingga didapatkan realisasi $18 + 24 \text{ ormas} / 60 \text{ ormas} \times 100\%$ yaitu 70%.

Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan

N O	Sasaran	Indikator	Formula Indikator	Sumber Data
1	2	3	4	5
1	Program pemberdayaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Persentase Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	Jumlah ormas yang dibina / Jumlah target renstra x 100%	Data Ormas yang ada di kabupaten Bangka

Dalam pencapaian realisasi program tersebut adanya dukungan kegiatan yaitu "Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan" dengan indikator kinerja '*Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan*' dengan target 70 % dan pencapaian dihasilkan 70 % Sedangkan sub kegiatan yang mendukung tercapainya realisasi yaitu "Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya" dengan Indikator *Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya* dengan target 1 laporan dengan pencapaian 100 % melalui perhitungan : $\text{Jumlah Laporan yang disusun} / \text{Jumlah laporan yang direncanakan} \times 100\%$.

I	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	100	100	100%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Verifikasi Bantuan hibah Partai Politik dan Pembinaan Partai Politik	100	100	100%
	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi,	40 orang (Sosialisasi Pemilih Pemula)	40 orang (Sosialisasi Pemilih Pemula)	100%

	<i>Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	<i>Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah</i>	<i>12 Parpol</i>	<i>12 Parpol</i>	<i>100%</i>
			<i>206.733 orang Pemilih pada PEMILU (105.725 Laki-laki dan 101.008 Perempuan)</i>	<i>206.733 orang Pemilih pada PEMILU (105.725 Laki-laki dan 101.008 Perempuan)</i>	<i>100%</i>
	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah</i>	<i>1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu)</i>	<i>1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu)</i>	<i>100%</i>
ii.	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	Persentase Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	70.00%	70.00%	100%
	Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	70.00%	70.00%	100%
	<i>Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya</i>	<i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>1 Laporan</i>	<i>100%</i>

b. Perbandingan antara Realisasi Kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Berdasarkan Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 diketahui bahwa Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka telah menetapkan 3 (tiga) target kinerja yang akan dicapai selama Tahun 2023, untuk selanjutnya akan dilakukan pengukurannya dengan menggunakan Formulir Pengukuran Kinerja Tahun 2023 agar diketahui hasilnya setelah Tahun Anggaran 2023 berakhir. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja Kesbangpol Kabupaten Bangka Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

Tabel 3.8
Perbandingan Realisasi Sasaran dengan Tahun Sebelumnya

No	Indikator Sasaran	SATUAN	Realisasi					Target Renstra 2023 (%)
			2019	2020	2021	2022	2023	
1	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	Persen	100	70	62.5	78,43	80,36	90
2	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	Persen	94,34	100	100	100	100	70
3	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Persen	CC	BB (70,10)	BB 71,51	B 67,34	BB 71,51	71,51

Untuk tahun akhir Renstra tahun 2023 ini Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berhasil menunjukkan capaian yang baik dibandingkan dari tahun sebelumnya karena terjadi peningkatan realisasi dari tahun 2019 s.d 2023.

c. Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis

Rencana strategis adalah rencana target kinerja yang disusun untuk 5 tahun kedepan dari pelaksanaan RPJMD Bupati terpilih 2019-2023. Tahun 2023 merupakan akhir dari periode Renstra dan pelaksanaan RPJMD tersebut.

Setelah diperoleh perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja Kesbangpol Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan Tahun 2022 dan beberapa tahun terakhir, langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja Kesbangpol Kabupaten Bangka sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis. Adapun perbandingannya adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	TARGET RENSTRA KUMULATIF	REALISASI S.D 2023
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	90	80,36
2	Meningkatnya Kesadaran Politik	Persentase Cakupan Politik dan	70	100

	Masyarakat	Organisasi Masyarakat		
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	BB (71,51)	BB (71,51)

Jika dibandingkan dari capaian tahun dari tahun pertama sampai tahun kelima dengan target kinerja sasaran strategis pada renstra 2019-2023 mengalami peningkatan dari tahun 2020 s.d 2023 maka dapat disimpulkan capaian kinerja tahun 2023 sudah dikatakan baik dengan pencapaian diatas 80,36%. Capaian ini disebabkan oleh belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan yang mendukung pencapaian target kinerja disebabkan kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di Badan Kesbangpol serta SDM yang berkualitas dan berkompeten dalam membantu pelaksanaan kegiatan – kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka. Serta Hambatan yang terjadi dalam pencapaian target kinerja Renstra adalah ketersediaan penganggaran yang disetujui oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bangka. Dalam dokumen anggaran yang ditetapkan tidak sesuai dengan rencana yang sudah ditetapkan dalam dokumen Renstra dan Renja, sehingga sangat mempengaruhi capaian target kinerja tahunan/Renja dengan target Renstra.

d. Membandingkan realisasi Kinerja tahun ini dengan standar Nasional (Jika ada)

Setelah diperoleh perbandingan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka sampai dengan Tahun 2023 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis, langkah berikutnya adalah membandingkan realisasi kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka Tahun 2023 dengan standar nasional atau Daerah lain. Akan tetapi karena standar nasional realisasi kinerja untuk Badan Kesatuan Bangsa dan Politik belum ada, maka belum dapat dilakukan proses pembandingannya.

e. Analisis penyebab keberhasilan/ kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Secara keseluruhan ditahun 2023 capaian kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka terhadap sasaran strategis dapat dikatakan berhasil dalam mencapai target indikator kinerja keberhasilan ini disebabkan oleh beberapa faktor :

- a. Adanya koordinasi dan komunikasi yang intensif dengan beberapa SKPD dan instansi terkait
- b. Telah terbentuknya tim dan forum-forum strategis yang difasilitasi oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK), Tim Terpadu Pencegahan Pemberantasan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika (P4GN) serta Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial. Forum-forum ini berperan penting dalam mendeteksi dan mengantisipasi setiap permasalahan atau gangguan yang mungkin timbul di tengah masyarakat karena forum ini merupakan wadah informasi, komunikasi, konsultasi dari berbagai unsur terkait dalam rangka mewujudkan sinergitas dan harmonisasi dalam menghadapi dan mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkembang di tengah- tengah masyarakat.
- c. Terjalinnya koordinasi intensif dengan jajaran Forkopimda Kabupaten Bangka dan instansi lainnya dalam mengantisipasi permasalahan yang berkembang khususnya yang berkaitan dengan konflik sehingga dapat terwujud persamaan persepsi, visi dan misi serta dapat menghasilkan rekomendasi sebagai acuan dalam menyelesaikan permasalahan di daerah.
- d. Terjalinnya koordinasi dan konsolidasi dengan tokoh-tokoh masyarakat (alim ulama, tokoh agama, tokoh adat) dalam melakukan deteksi dini dan pencegahan terkait berbagai permasalahan khususnya masalah konflik sosial.

Namun, dalam pencapaian kinerja ini masih terdapat beberapa kendala atau hambatan diantaranya :

- a. Masih terbatasnya jumlah Inteligen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi.
- b. Permasalahan masih adanya peredaran gelap narkoba di Kabupaten Bangka yang memerlukan penanganan dan penanggulangan dengan deteksi dini dan cegah dini.
- c. Minimnya dukungan anggaran untuk melaksanakan kegiatan khususnya anggaran untuk pemberdayaan forum-forum strategis yang sudah terbentuk.
- d. Belum optimalnya peran kecamatan dalam deteksi dini terhadap permasalahan keamanan dan ketertiban di daerahnya.
- e. Kurangnya Sumber Daya Manusia yang handal dan Berkualiatas di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
- f. Terbatasnya jumlah Pelaksana ASN di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam membantu pelaksanaan kegiatan yang ada di Badan Kesbangpol
- g. Adanya rasionalisasi dan efisensi anggaran yang menyebabkan adanya kegiatan yang ditunda pelaksanaannya.

Untuk mengantisipasi permasalahan di atas, ada beberapa solusi/alternative yang telah dilakukan oleh Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka diantaranya :

1. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam pencapaian sasaran perangkat daerah untuk menekan gesekan-gesekan sosial dan potensi konflik yang mungkin terjadi
2. Mengintensifkan deteksi dini dan cegah dini potensi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba dengan berbagai metode untuk seluruh lapisan masyarakat
3. Memaksimalkan fungsi Inteligen yang ada pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka untuk melakukan deteksi dini dan cegah dini terhadap potensi konflik yang terjadi di daerah.

4. Meningkatkan toleransi, hormat menghormati dan saling menghargai dalam kehidupan bermasyarakat untuk kerukunan dan keutuhan bangsa dengan cara melaksanakan kegiatan- kegiatan yang melibatkan berbagai tokoh agama, pemuda daerah dan lintas suku.
5. Memanfaatkan anggaran yang tersedia secara efektif dan efisien untuk melaksanakan kegiatan pemantauan, sosialisasi, rapat koordinasi, serta pemberdayaan forum-forum strategis yang sudah terbentuk di daerah dan;
6. Mengintensifkan koordinasi dan kerjasama dengan dengan instansi- instansi terkait.
7. Melakukan penganggaran kembali di tahun berikutnya terhadap kegiatan atau sub kegiatan yang mengalami rasionalisasi di tahun 2023.
8. Meningkatkan jumlah Sumber daya manusia dan kualitas pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka sehingga seluruh kegiatan dapat dilaksanakan dengan tepat waktu dan efisien.

f. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Setelah dilakukan analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah melakukan analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka selama Tahun 2023, yang diuraikan sebagai berikut :

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya:

- Realisasi secara fisik telah mencapai target, untuk penyerapan anggaran memang tidak terserap secara keseluruhan dikarenakan perencanaan anggaran menyesuaikan dengan kebutuhan;
- Terjadinya Defisit Anggaran sehingga di wajibkan melakukan efisensi terhadap kegiatan yang belum di proritaskan untuk dilaksanakan.
- Efisiensi pada Angaran Hibah TNI dan Polri yang belum dilakukan pencairan

disebabkan belum meemasuki tahapan pemilu.

Tabel 3.9
Capaian Kinerja dan Penyerapan Anggaran

No	Sasaran	Indikator	Capaian (%)	% Penyerapan Anggaran	Efisiensi (pagu-serapan)
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	80,36	93,44	-13,08
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	100	87,47	12,53
3	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Badan Kesbangpol	Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	100	87,46	12,08

Dari tabel diatas dapat dilihat :

- Indikator Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan dengan pagu anggaran Rp. 1.538.150.700,- dan setelah terjadi perubahan Rp. 1.784.264.475,- dan terealisasi sebesar Rp. 1.667.197.367,- dan sisa anggaran Rp. 111.067.108,- atau 0.065%. Dari jumlah Rp. 1.784.264.475,- tersebut sebesar Rp. 150.000.000,- merupakan dana hibah yang diberikan kepda FKUB Kabupaten Bangka dan sebesar **Rp. 1.634.264.475,-** yang merupakan anggaran untuk sub kegiatan teknis dalam mendukung capaian kinerja sasaran Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka.
- Indikator Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat dengan pagu anggaran Rp. 4.038.089.213,00982,- dan setelah terjadi perubahan Rp. 18.464.903.722,- serta terealisasi Rp. 16.150.549.338,- atau 87%. Dari anggaran sebesar Rp. 18.464.903.722,- tersebut sebesar **Rp. 17.314.119.200,-** merupakan dana Hibah untuk Perispan Pilkada bagi KPU, Bawaslu dan TNI Polri. Sedangkan untuk dana Hibah Rp. 2.271.098.800 untuk TNI dan Polri tidak dilakukan pencairan di sebabkan TNI dan Polri belum memasuki tahap pilkada sehingga tidak dilakukan pencairan di 2023 dan melakukan penganggaran kembali di tahun 2024.

- Indikator Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol dengan pagu anggaran Rp. 4.183.793.367,- dan setelah terjadi perubahan Rp. 3.068.149.360,- dan terealisasi sebesar Rp. 2.683.289.750,- dan sisa anggaran Rp. 384.859.610,- atau 12,54%. Jumlah realisasi anggaran ini adalah untuk belanja langsung dan belanja tidak langsung (Gaji dan Tunjangan ASN).

g. Analisis Program dan Kegiatan yang Menunjang Pencapaian Kinerja

Dalam pencapaian Sasaran Strategis, didukung oleh 5 (Lima) Program yaitu Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan, Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Etika Serta Budaya Politik, Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan, Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya, dan Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial. Adapun alokasi anggaran untuk mendukung program ini adalah sebesar Rp. 385.382.298,-, dan satu Program Penunjang yaitu Program penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 17.817.746.705,- atau 87,99% dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mencapai sasaran ini adalah :

- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan
- Kegiatan Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya
- Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

Secara langsung jika dilihat dari program , kegiatan dan sub kegiatan yang terdapat dalam dokumen anggaran yang telah ditetapkan dapat dinyatakan bahwa program , kegiatan dan sub kegiatan sangat menunjang pencapaian pernyataan kinerja namun dengan adanya rasionalisasi anggaran menyebabkan tidak tersedianya anggaran untuk melaksanakan Sub Kegiatan yang telah direncanakan sehingga Pencapaian pernyataan kinerja tidak sepenuhnya didukung oleh program, kegiatan dan Sub kegiatan.

Permasalahan strategis yang berpengaruh terhadap pencapaian pernyataan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik disebabkan oleh faktor internal dan eksternal, yang antara lain adalah:

a. Faktor internal

1. Sarana dan prasara yang masih kurang dan belum memenuhi standar kerja.
2. Jumlah SDM yang masih terbatas.
3. Jumlah anggaran yang tersedia belum sesuai dengan perencanaan.
4. Profesional dan integritas aparatur yang ada belum sesuai dengan yang diharapkan.
5. Sistem dan proses kerja yang belum optimal dan sistematis.
6. Proses administrasi yang belum berjalan dengan baik.
7. Pemahaman terhadap tupoksi dan aspek kerja yang masih kurang.

b. Faktor eksternal

1. Jumlah organisasi sosial yang fokus pada bidang kesatuan bangsa.
2. Jumlah forum lintas agama yang fokus pada penguatan kesatuan bangsa.
3. Jumlah lembaga masyarakat yang fokus pada bidang kesatuan bangsa.
4. Jumlah forum lintas agama, organisasi masyarakat dan lembaga penelitian yang aktif dalam kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.
5. Jaringan kerjasama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka dengan organisasi masyarakat, lembaga penelitian dan forum keagamaan yang fokus pada bidang kesatuan bangsa dan Politik.

Berdasarkan faktor internal dan eksternal tersebut, maka strategi pemecahan masalah yang ditetapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka mengarah pada :

- 1) Peningkatan koordinasi dan integrasi yang didukung oleh system kerja dan

manajerial yang optimal.

- 2) Optimalisasi penggunaan sarpras dan anggaran.
- 3) Peningkatan SDM melalui pendidikan dan pelatihan serta pembelajaran secara offline maupun online.
- 4) Peningkatan kerjasama dan komunikasi antara lembaga daerah, ormas, serta lembaga vertikal lainnya.

Dokumentasi Pelaksanaan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja :

1. Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan



Seleksi Kepribadian Paskibraka



Kegiatan Seleksi TC Paskibraka



Seleksi Paskibraka

2. Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
		<p>Kegiatan Verifikasi Bantuan Keuangan Partai Politik</p>
		<p>Kegiatan penandatanganan Pakta Integritas</p>



Kegiatan Penandatanganan NPHP
Dana Hibah Pilkada TNI dan POLRI
dengan PJ. Bupati Bangka



Kegiatan Penandatanganan Hibah
Pilkada dengan KPU dan Bawaslu



Kegiatan Sosialisasi pendidikan
politik bagi pemilih pemula



Pemantauan Persiapan Pemilu 2024



Monitoring pemantauan persiapan
Pemilu Jumlah Pemilih pemula

3. Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan



Kegiatan Pemantauan Ormas



Kegiatan Pemantauan Ormas di Desa Air
Duren Kec. Mendo Barat



Kegiatan Pemantauan Keberadaan
Ormas ke Kecamatan

4. Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi Sosial dan Budaya



Kegiatan Sosialisasi P4GN di Kelurahan



Kegiatan Sosialisasi P4GN di Kelurahan



Kegiatan FKUB berupa dialog antar tokoh lintas agama



Kegiatan FKUB Kunjungan ke Pagaralam

5. Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitas Penanganan Konflik Sosial

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
		<p>Kegiatan Pemantauan Tenaga Kerja Asing</p>
		<p>Kegiatan Pemantauan Tenaga Kerja Asing</p>
		<p>Kegiatan Penanganan Konflik Sosial</p>



Kegiatan Penanganan Konflik Sosial

Tabel 3.10
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
TAHUN 2021 DAN 2023

NO	KODE REKENING	SASARAN STRATEGIS	PROGRAM/KEGIATAN INDIKATOR 2023	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN /SUB KEGIATAN 2022	2022				2023			
					TARGET	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN	TARGET	TARGET PERUBAHAN	REALISASI	CAPAIAN
1			2	3	4	4	6	7	4	4	6	7
	8		UNSUR PEMERINTAHAN UMUM									
	8.01		KESATUAN BANGSA DAN POLITIK									
1		Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Birokrasi Badan Kesbangpol		Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	71,10	71,51	67.34	67.34	71,10	71,51	71,51	71,51
I	8.01.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH									
				Nilai aspek perencanaan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	26.5	26.5	20.98	77.70%	27,00	27,00	27,00	100%
				Nilai aspek pelaporan kinerja dalam AKIP Perangkat Daerah	11	11	10.18	85%	12,00	12,00	12,00	100%
	8.01.01.2.01		Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan Kinerja yang disusun Sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
				Persentase pelaporan kinerja yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100	100%	100%	100%
	8.01.01.2.01.01	Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan kinerja yang disusun	5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	100%
	8.01.01.2.01.02	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				19 Dokumen	100%	5 Dokumen	5 Dokumen	100%	100%

	8.01.01.2.01.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD						2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%
	8.01.01.2.01.04	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD						2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%
	8.01.01.2.01.05	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD						2 Dokumen	2 Dokumen	100%	100%
	8.01.01.2.01.06	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah laporan kinerja yang disusun	19 Dokumen	19 Dokumen	100%		3 Laporan	3 Laporan	100%	100%
	8.01.01.2.01.07	Sub Kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						8 Laporan	8 Laporan	100%	100%
				Persentase Temuan Pengelolaan Keuangan OPD dlm LHP-BPK RI	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
	8.01.01.2.02		Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pelaporan Keuangan yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Persentase Pelaporan Aset yang disusun sesuai standar	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	8.01.01.2.02.01	Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah layanan pembayaran gaji dan tunjangan pegawai perangkat daerah yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	23 Orang/bulan (16 Laki-laki dan 7 Perempuan)	23 Orang/bulan (16 Laki-laki dan 7 Perempuan)	18 Orang/bulan (16 Laki-laki dan 7 Perempuan)	100%
	8.01.01.2.02.02	Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD						12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	100%

	8.01.01.2.02.03	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD						2 Laporan (1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 Notulen Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun)	2 Laporan (1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 Notulen Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun)	2 Laporan (1 Dokumen Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan 1 Notulen Rapat Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun)	100%
	8.01.01.2.02.07	Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan /Triwulanan /Semesteran SKPD	Jumlah laporan keuangan Perangkat Daerah yang disusun	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	52 Laporan (12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 2 Dokumen Laporan Aset Semesteran, 12 Dokumen Laporan Persediaan Bulanan, 1 Dokumen Laporan Semesteran SKPD, 1 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dan 12 Laporan Bulanan Hibah)	52 Laporan (12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 2 Dokumen Laporan Aset Semesteran, 12 Dokumen Laporan Persediaan Bulanan, 1 Dokumen Laporan Semesteran SKPD, 1 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dan 12 Laporan Bulanan Hibah)	52 Laporan (12 Dokumen Laporan Keuangan Bulanan, 12 Dokumen Laporan Fisik dan Keuangan, 2 Dokumen Laporan Aset Semesteran, 12 Dokumen Laporan Persediaan Bulanan, 1 Dokumen Laporan Semesteran SKPD, 1 Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran dan 12 Laporan Bulanan Hibah)	100%

				Indeks Profesionalisme Aparatur	64.66	64.66	64.66	64.66	64,76	64,76	64,76	100
	8.01.01.2.05		Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase aparatur yang memperoleh sertifikat pengembangan kompetensi	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	18,75	18,75	18,75	100%
				Persentase aparatur yang bekerja tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100%
				Persentase aparatur yang berkinerja baik	100%	100%	100%	100%	100	100	100	100%
	<i>8.01.01.2.05.02</i>	<i>Sub Kegiatan Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya</i>	<i>Jumlah paket pakaian dinas beserta atribut kelengkapan</i>	<i>Jumlah pakaian olah raga yang tersedia</i>	<i>16 Stel</i>	<i>16 Stel</i>	<i>16 Stel</i>	<i>100%</i>	<i>1 Paket</i>	<i>1 Paket</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
	<i>8.01.01.2.05.09</i>	<i>Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi</i>	<i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>	<i>Jumlah aparatur yang mengikuti pendidikan dan pelatihan formal</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>-</i>	<i>4 orang</i>	<i>4 orang</i>	<i>100%</i>	<i>100%</i>
				Indeks Sarana dan Prasarana	65	65	65	65	70	70	70	100%
				Indeks Tata Laksana Organisasi Perangkat Daerah	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85	1.85
	8.01.01.2.06		Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Prasarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	<i>8.01.01.2.06.09</i>	<i>Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>	<i>Jumlah layanan Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi yang tertangani</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>12 Bulan</i>	<i>100%</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>12 Laporan</i>	<i>100%</i>
	<i>8.01.01.2.06.10</i>	<i>Sub Kegiatan Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>						<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>100%</i>
	<i>8.01.01.2.06.11</i>	<i>Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>	<i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i>						<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>12 Dokumen</i>	<i>100%</i>

	8.01.01.2.0 7		Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan sarana Pendukung Kinerja Perangkat Daerah	30%	30%	30%	30%	40	40	40%	100%
	8.01.01.2.0 7.05		Sub Kegiatan Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel Kantor yang diadakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%
	8.01.01.2.0 7.06		Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	11 Unit	11 Unit	11 Unit	100%
	8.01.01.2.0 8		Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Arsip Perangkat Daerah yang dikelola sesuai peraturan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
				Jumlah Aspek Layanan Perangkat Daerah yang menggunakan teknologi informasi	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan	3 Layanan
	8.01.01.2.0 8.01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat menyurat	Jumlah layanan administrasi persuratan yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	8.01.01.2.0 8.02		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah layanan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
				Jumlah Layanan Penyediaan Internet yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%
	8.01.01.2.0 8.04		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah layanan Jasa kebersihan kantor yang tertangani	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%	12 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100%
	8.01.01.2.0 9		Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase BMD dalam kondisi baik	65%	65%	65%	65%	70%	70%	70%	100%
	8.01.01.2.0 9.01		Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah kendaran Dinas/Operasional yang dipelihara	2 Unit Kendaraan Roda Empat, 5 Unit Kendaraan Roda Dua	2 Unit Kendaraan Roda Empat, 5 Unit Kendaraan Roda Dua	2 Unit Kendaraan Roda Empat, 5 Unit Kendaraan Roda Dua	100%	2 Unit Mobil dan 5 Unit Motor	2 Unit Mobil dan 5 Unit Motor	100%	100%
	8.01.01.2.0 9.06		Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan perlengkapan kantor yang dipelihara	1 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	12 Unit	12 Unit	100%	100%

	8.01.01.2.0 9.09		Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor yang dipelihara/rehabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit
2		Meningkatnya Wawasan Kebangsaan		Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	85%	85%	66,67%	78,43%	90	90	72.33%	80.36%
II.	8.01.02		PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN									
				Persentase Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90%	90%	0	0%	100	100%	50%	50%
	8.01.02.2.0 1		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase pelaksanaan Bidang ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	90%	90%	0	0%	100	100%	50%	50%
	8.01.02.2.01 .03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan						30 Orang (Peserta Paskibraka Kabupaten)	30 Orang (Peserta Paskibraka Kabupaten)	30 Orang (Peserta Paskibraka Kabupaten)	100%
	8.01.02.2.01 .04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah kebangsaan	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	Jumlah peserta Seminar wawasan kebangsaan yang hadir	40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan)	40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan)	0	0%	40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan) Peserta Seminar Wawasan Kebangsaan	Defisit Anggaran	0%	-
3		Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat		Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	65%	65%	65%	100%	100	100	100%	100%

III.	8.01.03		PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK									
				Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat	90%	90%	90%	90%	100	100%	100	90%
	8.01.03.2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	Persentase Verifikasi Bantuan hibah Partai Politik dan Pembinaan Partai Politik	100%	100%	100%	100%	100	100%	100	100%
	8.01.03.2.01.03	Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, Serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	Jumlah anggota partai politik yang mengikuti pembinaan	72 Orang	0	0	0%	40 orang (Sosialisasi Pemilih Pemula)	40 orang (Sosialisasi Pemilih Pemula)	40 orang (Sosialisasi Pemilih Pemula)	100%
				Jumlah partai politik yang diverifikasi Bantuan Keuangan Parpol.	12 Parpol	12 Parpol	12 Parpol	100%	12 Parpol	12 Parpol	12 Parpol	100%
									206.733 orang Pemilih pada PEMILU (105.725 Laki-laki dan 101.008 Perempuan)	206.733 orang Pemilih pada PEMILU (105.725 Laki-laki dan 101.008 Perempuan)	206.733 orang Pemilih pada PEMILU (105.725 Laki-laki dan 101.008 Perempuan)	100%

	8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah						1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu)	1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu)	1 Laporan (Pemantauan Situasi Politik Persiapan Pemilu)	100%
IV.	8.01.04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN									
				Persentase Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	8.01.04.2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	Persentase Pelaksanaan Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%	60%
	8.01.04.2.01.03	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya	Jumlah Laporan Hasil Monitoring Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya	Jumlah Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang diawasi	5 LNL	5 LNL	5 LNL	100%	5 LNL	5 LNL	5 LNL	100%
V.	8.01.05		PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA									
				Persentase Cakupan Ketahanan sosial dan budaya	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%

	8.01.05.2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	Persentase Pelaksanaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan	90%	90%	90%	90%	100%	100%	100%	100%
	8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	Jumlah masyarakat yang mengikuti Peningkatan Toleransi dan Kerukunan dalam kehidupan Beragama	40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan)	40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan)	40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan)	100%				
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		1 Forum	1 Forum	100%		1 Forum	1 Forum	1 Forum	100%
									24 Orang Satgas Anti Narkotika	Rasionalisasi	0%	0%
									40 Orang (20 orang laki-laki dan 20 orang Perempuan) peserta Sosialisasi P4GN	Rasionalisasi	0%	0%
VI.	8.01.06		PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL									

				Persentase Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial	90%	90%	90%	80%	100%	100%	100%	80%
	8.01.06.2.01		Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	Persentase Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	90%	90%	90%	80%	100%	100%	100%	80%
	8.01.06.2.01.04	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	40 orang peserta Penanganan Konflik Sosial	40 orang peserta Penanganan Konflik Sosial	40 orang peserta Penanganan Konflik Sosial	100%
	8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					2 Laporan (Pemantauan Orang Asing)	2 Laporan (Pemantauan Orang Asing)	2 Laporan (Pemantauan Orang Asing)	100%
	8.01.06.2.01.06	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Dokumen	Defisit Anggaran	Defisit Anggaran	0%

Dari tabel 3.20 diketahui bahwa dapat dilihat bahwa terdapat perbedaan penamaan dan pengelompokan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan untuk tahun 2022 dan 2023. Pengelompokan tersebut berdasarkan Permendagri nomor 050-5889 tahun 2021 tentang Klasifikasi, kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Adapun perbandingan capaian kinerja kegiatan tahun 2022 dan tahun 2023 dengan indikator dan target yang ditetapkan, maka terdapat kegiatan yang sama yang dapat dibandingkan yaitu :

1. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Kegiatan ini Pada tahun 2022 dan 2023 dengan sub Kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan di rencanakan untuk dilaksanakan pada tahun 2022 dan 2023, dengan Indikator Jumlah peserta Seminar wawasan kebangsaan yang hadir untuk 2022 sedangkan indikator 2023 Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan dengan target 40 orang dengan capaian 0%.

2. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik.

Pada tahun 2022 dan 2023 kegiatan ini dilaksanakan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta

Pemantauan Situasi Politik Di Daerah, tetapi indikator nya yang berbeda berdasarkan nomenklatur sedangkan untuk target pelaksanaan nya tetap sama 12 parpol dengan pencapaian 100%.

3. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya

Pada tahun 2022 dan 2023 kegiatan ini dilaksanakan dengan sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah dengan target yang sama 1 forum dan pencapaiannya 100%.

4. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial.

a. Pada tahun 2022 dan 2023 kegiatan ini dilaksanakan dengan sub Kegiatan Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah dengan indikator Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah pada tahun 2022 dengan target 1 laporan dengan pencapaian 100 % sedangkan untuk tahun 2023 meningkat dengan target 2 Laporan dapat dilaksanakan dengan capaian 100%.

b. Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Pada tahun 2022 dan 2023 kegiatan ini dilaksanakan dengan sub Kegiatan

Sub Kegiatan Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Jumlah Laporan dengan target 1 laporan dengan pencapaian 100% sedangkan indikator pada tahun 2023 Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota dengan target 1 Dokumen belum bisa dilaksanakan direnakan defisit anggaran dengan capaian 0 %.

5. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

Pada tahun 2022 kegiatan ini dilaksanakan dengan Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan dibidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah dengan indikator Jumlah Lembaga Nirlaba Lainnya (LNL) yang diawasi dapat dilaksanakandengan capaian 100% dengan target 5 LNL, sedangkan untuk tahun 2023 dengan sub Kegiatan **Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya dengan indikator** *Jumlah Laporan Hasil Monitoring Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya dengan target 1 laporan mencapai 100%.*

Untuk capaian Kinerja Sasaran Strategis tahun 2022 dan 2023 sebagai berikut :

Tabel 311
Capaian Indikator Kinerja Strategis Tahun 2022

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	Target Tahunan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian (%)
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	1.1	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	%	85	85	66,67	78,43
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	2.1	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	%	65	65	65	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Kesbangpol		Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Nilai	BB (70,10)	BB (71,51)	BB (71,51)	

Tabel 3.12
Capaian Kinerja Sasaran Strategis
Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka
Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator Kinerja		Satuan	2023			
					Target Tahunan	Target Perubahan	Realisasi	Capaian (%)
1	2	3		4	6	7	8	9
1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan	1.1	Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan	%	90	90	72,33	80,36
2	Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat	2.1	Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat	%	100	100	100	100
3	Meningkatnya Akuntabilitas Badan Kesbangpol		Hasil Evaluasi AKIP Badan Kesbangpol	Nilai	BB (71,51)	BB (71,51)	BB (71,51)	

Berdasarkan tabel 3.3 dan 3.4 dapat dilihat terjadi peningkatan capaian realisasi Sasaran Strategis pada tahun 2022 dibandingkan capaian pada tahun 2023. Untuk sasaran strategis "Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat" dengan Indikator Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat dengan capaian realisasi 100%. Sedangkan untuk sasaran "Meningkatnya Wawasan Kebangsaan" dengan Indikator "Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan " mengalami peningkatan pada tahun 2022 dari target 85% dengan pencapaian 78,43% Sedangkan pada tahun 2023 dari target 90% dengan realisasi pencapaian 80,36% yang disebabkan adanya satu sub kegiatan Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang tidak dilaksanakan dikarenakan terjadi Defisit anggaran dan rasionalisasi anggaran yang terjadi pada bulan agustus 2023 sehingga terjadinya efisiensi anggaran dan prioritas kegiatan yang dilaksanakan yaitu kegiatan rutin dan pelaksanaan yang berkaitan dengan pemilu dan pilkada.

B. REALISASI ANGGARAN

Anggaran belanja Badan Kesbangpol Kabupaten Bangk terdiri belanja operasi yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja hibah dan belanja modal dengan realisasi anggaran sebagai berikut :

NO	JENIS BELANJA	TAHUN 2022			TAHUN 2023		
		RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKA T CAPAIA N	RENCANA (Rp)	REALISASI (Rp)	TINGKAT CAPAIAN
1	Belanja Operasi	5,193,759,728.00	4,067,294,213.00	78.31	23,232,216,566.00	20,415,936,455.00	87.88
a.	Belanja Pegawai	3,288,052,800.00	2,213,620,582.00	67.32	2,158,115,893.00	1,829,718,353.00	84.78
b.	Belanja Barang dan Jasa	804,551,495.00	752,518,198.00	93.53	2,658,826,040.00	2,442,042,269.00	91.85
c.	Belanja Hibah	1,101,155,433.00	1,101,155,433.00	100.00	18,415,274,633.00	16,144,175,833.00	87.67
d.	Belanja Modal	118,769,000.00	110,599,700.00	93.12	85,100,991.00	85,100,000.00	100.00
JUMLAH		5,312,528,728.00	4,177,893,913.00	78.64	23,317,317,557.00	20,501,036,455.00	87.92

Secara umum, kinerja pengelolaan keuangan Badan Kesbangpol tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2022. Realisasi Belanja pada tahun 2023 mencapai 87,92% sedang realisasi tahun 2022 hanya 78,64%. Belanja Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka tahun 2023 pada anggaran induk sebesar 9.760.033.280 dan mengalami perubahan sebesar Rp. 23.317.317.557,- yang terdiri dari Belanja Pegawai Rp. 2,158,115,893.00-, Belanja Barang dan Jasa Rp. 2,658,826,040.00 -, Belanja Hibah Rp. 18,415,274,633.00-, dan Belanja Modal Rp. 85,100,991.00. terjadinya kenaikan yang signifikan pada anggaran perubahan Badan Kesbangpol disebabkan berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 29 September 2023 tentang pendanaan kegiatan pemilihan gubernur dan wakil gubernur Bupati dan Wakil Bupati serta walikota dan wakil walikota Tahun 2024 menyatakan bahwa Pemerintah Provinsi, Kabupaten wajib menganggarkan dana hibah Pilkada pada APBD Perubahan 2023 sebanyak 40 Persen, dan APBD 2024 sebanyak 60 persen. Oleh sebab itu berdasarkan surat edaran tersebut anggaran

badan kesbangpol mengalami kenaikan pada anggaran Hibah sebesar 40 persen yaitu Hibah KPU, Bawaslu dan TNI Polri. Sedangkan realisasi yang dicapai pada Belanja Pegawai terealisasi sebesar Rp. 1,829,718,353.00-, atau 84,78%, Realisasi Belanja Pegawai mengalami peningkatan dibanding realisasi tahun 2022 yang realisasinya sebesar 67,32% yang disebabkan Jumlah anggaran untuk Gaji dan pegawai tidak sebanding dengan jumlah ASN yang ada di Badan Kesbangpol Kabupaten Bangka sehingga realisasi tidak mencapai 100%. Untuk Belanja Barang dan Jasa dialokasikan anggaran sebesar 2,658,826,040.00 dengan realisasi sebesar Rp. 2,442,042,269.-, atau 91,85%. capaian ini menurun jika dibandingkan tahun 2022 yaitu sebesar 93,53%. Penurunan ini sebabkan terjadinya defisit anggaran dan efisensi penggunaan anggaran. Sedangkan untuk Belanja Hibah dialokasikan anggaran sebesar Rp. 18,415,274,633.00-, dengan realisasi sebesar Rp. 16,144,175,833.00-, atau 87,67%. Belum tercapainya belanja hibah dikarenakan adanya Hibah TNI Polri yang tidak di dilakukan pencairan disebabkan belum terdapatnya aturan yang jelas dalam pencairan Hibah TNI dan Polri disebabkan TNI dan Polri yang bertugas sebagai Pengamanan Pilkada belum memasuki tahap Pilkada sehingga beresiko untuk dilakukan pencairan di 2023 tetpai dianggarkan kembali pada anggaran 2024. Belanja Modal pada tahun 2023 sebesar Rp. 85,100,991.00-, dengan realisasi Rp. 85,100,000.00-, atau 100%. Mengalami peningkatan dibandingkan pada tahun 2022. Tetapi dari segi anggaran untuk belanja modal tahun 2022 menurun di bandingkan tahun 2023.

Rincian rencana dan realisasi anggaran program dan kegiatan yang dilaksanakan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik sepanjang tahun 2023 dapat dilihat tabel berikut :

Tabel 3.13
Anggaran dan Realisasi Belanja Tidak Langsung dan
Belanja Langsung Badan Kesbangpol Tahun 2023

NO	Uraian	JUMLAH ANGGARAN INDUK	JUMLAH ANGGARAN PERUBAHAN	JUMLAH PENGELUARAN ANGGARAN	KEUANGAN (%)
			(Rp.)	(Rp.)	
1	2	3	4	5	6
5.1	BELANJA OPERASI				87.92%
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4,183,793,367.00	3,068,149,360	2,683,289,750	87.46%
I.1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	32,000,000	36,792,479	25,800,000.00	70.12%
I.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	10,000,000.00	10,000,000	7,667,500.00	76.68%
I.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	5,000,000.00	5,000,000	4,845,000.00	96.90%
I.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	3,000,000.00	3,000,000	2,165,000.00	72.17%
I.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	3,000,000.00	3,000,000	1,285,000.00	42.83%
I.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	3,000,000.00	3,000,000	1,350,000.00	45.00%
I.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4,000,000.00	8,792,479	6,327,500.00	71.96%
I.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	4,000,000.00	4,000,000	2,160,000.00	54.00%
I.2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3,201,114,362.00	2,191,574,976	1,861,390,371.00	84.93%
I.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3,154,442,800.00	2,149,695,893	1,822,208,353.00	84.77%
I.2.2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	35,000,000.00	30,207,521	30,142,018.00	99.78%
I.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	5,000,000.00	5,000,000	2,380,000.00	47.60%
I.2.4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	6,671,562.00	6,671,562	6,660,000.00	99.83%
I.3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	49,750,000.00	20,377,360	20,377,360.00	100.00%
I.3.1	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	9,750,000.00	9,750,000	9,750,000.00	100.00%
I.3.2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	40,000,000.00	10,627,360	10,627,360.00	100.00%
I.4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	206,820,000.00	295,911,966	265,294,292.00	89.65%

I.4.1	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	150,000,000.00	238,868,646	208,250,972.00	87.18%
I.4.2	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	28,410,000.00	28,521,660	28,521,660.00	100.00%
I.4.3	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	28,410,000.00	28,521,660	28,521,660.00	100.00%
I.5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	88,069,130.00	85,450,991	85,450,000.00	100.00%
I.5.1	Pengadaan Mebel	34,242,480.00	32,900,000	32,900,000.00	100.00%
I.5.2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	53,826,650.00	52,550,991	52,550,000.00	100.00%
I.6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	308,509,875.00	316,311,588	306,715,859.00	96.97%
I.6.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	216,276,175.00	215,488,545	212,962,945.00	98.83%
I.6.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	29,400,000.00	38,143,789	31,629,711.00	82.92%
I.6.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	62,833,700.00	62,679,254	62,123,203.00	99.11%
I.7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	297,530,000.00	121,730,000	118,261,868.00	97.15%
I.7.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	88,760,000.00	87,960,000	87,626,868.00	99.62%
I.7.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	8,770,000.00	8,770,000	6,135,000.00	69.95%
I.7.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	200,000,000.00	25,000,000	24,500,000.00	98.00%
II	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN	1,165,500,000.00	1,447,262,900	1,389,350,767.00	96.00%
II.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	1,165,500,000.00	1,447,262,900	1,389,350,767.00	96.00%
II.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	1,125,500,000.00	1,407,262,900	1,389,350,767.00	98.73%
II.1.2	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan	40,000,000.00	40,000,000	0.00	0.00%
III.	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	4,023,089,213.00	18,449,903,722	16,141,517,483.00	87.49%

III.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	4,023,089,213.00	18,449,903,722	16,141,517,483.00	87.49%
III.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	3,873,089,213.00	18,315,641,272	16,037,956,183.00	87.56%
III.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	150,000,000.00	134,262,450	103,561,300.00	77.13%
IV	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN	15,000,000.00	15,000,000	9,031,855.00	60.21%
IV.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan	15,000,000.00	15,000,000	9,031,855.00	60.21%
IV.1.1	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah	15,000,000.00	15,000,000	9,031,855.00	60.21%
V	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	214,000,000.00	179,116,725	175,146,080.00	97.78%
V.I	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	214,000,000.00	179,116,725	175,146,080.00	97.78%
V.1.1	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	214,000,000.00	179,116,725	175,146,080.00	97.78%
VI	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	158,650,700.00	157,884,850	102,700,520.00	65.05%
VI.1	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	158,650,700.00	157,884,850	102,700,520.00	65.05%
VI.1.1	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	43,892,000.00	43,738,100	38,119,340.00	87.15%

VI.1.2	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	70,390,000.00	70,020,930	59,369,180.00	84.79%
VI.1.3	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota	44,368,700.00	44,125,820	5,212,000.00	11.81%
JUMLAH		9,760,033,280.00	23,317,317,557	20,501,036,455	87.92%

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah ikhtiar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan Laporan kinerja bagi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan perwujudan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta pengelolaan sumber daya yang ada. Laporan kinerja juga merupakan alat kendali, alat penilai kualitas kinerja dan alat pendukung terwujudnya *good governance*.

Tahun 2023 adalah Tahun terakhir dalam pelaksanaan RPJMD Bupati dan Wakil Bupati Bangka periode 2019-2023. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam melaksanakan urusannya mengacu kepada Visi Kabupaten Bangka yaitu Visi **Bangka Setara**, sehingga dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berusaha mengoptimalkanseluruh kapasitas yang dimiliki untuk meningkatkan dan mewujudkan seluruh masyarakat Kabupaten Bangka lebih Sejahtera dan Mulia. Sesuai dengan harapan terwujudnya "Bangka Setara", maka yang jadi fokus Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dalam mendukung Misi Pembangunan Kabupaten Bangka 2019-2023 adalah Misi ke empat yaitu **"Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional"**.

Berdasarkan pembahasan dan analisa capaian kinerja yang telah disampaikan pada bab sebelumnya maka dapat diambil kesimpulan bahwa rata-rata capain kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka tahun 2023 dengan predikat **tinggi** walaupun masih ada kegiatan yang belum dilaksanakan sepenuhnya.

Faktor utama penentu berbagai keberhasilan yang sudah dicapai sepanjang tahun 2023 ini adalah adanya komitmen dan dukungan pimpinan serta berbagai pihak pemangku kepentingan. Selain itu, walaupun secara kuantitas sangat terbatas, dukungan kemampuan personil yang memadai juga menjadi salah satu penentu keberhasilan

pencapaian kinerja di tahun 2023 ini. Permasalahan yang dihadapi terutama dalam pengumpulan data kinerja, pencatatan, pelaporan dan evaluasinya.

B. Langkah ke Depan :

Dalam upaya untuk meningkatkan kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada tahun mendatang, beberapa langkah strategis yang akan dilakukan antara lain adalah:

- 1) Peningkatan koordinasi dan integrasi yang didukung oleh system kerja dan manajerial yang optimal.
- 2) Pemenuhan Kebutuhan sarana dan Prasarana kerja yang memadai agar pelaksanaan kerja dapat berjalan dengan baik
- 3) Menempatkan sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan kualifikasi dalam bidang kesatuan bangsa dan politik..
- 4) Arah kebijakan anggaran harus di fokuskan dan diprioritaskan pada pencapaian sasaran dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi di bidang kesatuan bangsa dan politik
- 5) Peningkatan kerjasama dan komunikasi antara lembaga daerah, ormas, serta lembaga vertikal lainnya.
- 6) Perlunya penysunan jadwal pelaksanaan yang matang sehingga penyelesaian kegiatan lebih optimal.
- 7) Melakukan Monitoring dan Evaluasi Rencana Aksi Per Triwulan

Laporan kinerja ini merupakan laporan pertanggungjawaban dalam usaha mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Diharapkan saran serta masukan dari semua pihak guna perbaikan kinerja dimasa yang akan datang.

C. Tindak lanjut yang dilakukan dalam Pencapaian Kinerja

Untuk meningkatkan Pencapaian Tarket Kinerja Badan Kesatuan Bangsa Politik yang telah di rencanakan maka dapat dilakukan berbagai cara yaitu :

- a. Menyusun Rencana Aksi atas Target Kinerja secara berkala.

Untuk meningkatkan Target Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik pada Awal Tahap awal perencanaan kegiatan menyusun Rencana Aksi setiap Bidang. Dalam tahap penyusunan Rencana Aksi dilakukan dengan Rapat seluruh pegawai.

Dokumentasi Rapat Penyusunan Rencana Aksi Rencana awal



- b. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi secara berkala (Triwulan) melalui Rapat Evaluasi Rencana Aksi secara Triwulan Perbidang.

Untuk melihat tercapai atau tidaknya Rencana Aksi yang telah direncanakan di awal tahun maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan Rapat Evaluasi Rencana Aksi Triwulan per bidang.

Dokumentasi Evaluasi Rencana Aksi Triwulan I



Dokumentasi Evaluasi Rencana Aksi Triwulan II



Dokumentasi Evaluasi Rencana Aksi Triwulan ke III



Dokumentasi Evaluasi Rencana Aksi Triwulan ke IV



c. Melakukan Monitoring Pencapaian Kinerja secara Periodik.

Dalam meningkatkan Pencapaian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik juga melakukan Monitoring ke seluruh bidang terhadap rencana aksi kegiatan yang telah direncanakan dan juga melakukan monitoring terhadap pelaksanaan kegiatan. Tujuan Monitoring untuk mengevaluasi permasalahan di lapangan terkait hambatan dalam pencapaian kinerja

Dokumentasi Monitoring Rencana Aksi Pemantauan WNA Ke PT. Timah ke Kecamatan Belinyu



d. Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi Penyusunan LAKIP

Untuk melihat tercapai atau tidaknya Rencana Aksi yang telah direncanakan di awal tahun maka Badan Kesatuan Bangsa dan Politik melakukan Rapat Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.



LAMPIRAN LAMPIRAN :

1. PERJANJIAN KINERJA 2023
2. PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
3. TINDAK LANJUT LHE 2022
4. SOP PENYUSUNAN LAKIN
5. CASCADING RENSTRA
6. LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN
2023



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemeritahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MOHD. NURSI, S. IP
Jabatan : PLT. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : MULKAN, SH., MH
Jabatan : BUPATI BANGKA


Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA

MULKAN, SH., MH

Sungailiat, 30 Januari 2023
PIHAK PERTAMA

MOHD. NURSI, S. IP
PEMBINA TK. I
NIP. 19680602 198810 1 001



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : ROMLAN, S.Ag
Jabatan : KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : M. HARIS AR, AP.,MH
Jabatan : Pj. BUPATI BANGKA

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA



M. HARIS AR, AP.,MH

Sungailiat, 01 November 2023

PIHAK PERTAMA



ROMLAN, S. Ag
PEMBINA
NIP. 19741029 200604 1 008



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat, Telp. (0717) 93296

Sungailiat, 17 Juli 2023

Nomor : 700/331 /Bankesbangpol/2023
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : **Tanggapan atas LHE AKIP Inspektorat Tahun 2022**

Kepada
Yth. Inspektur Kabupaten Bangka

di-
Tempat

Sesuai dengan Laporan Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Kabupaten Bangka Tahun 2022, berikut kami sampaikan tanggapan atas Laporan Hasil Evaluasi dimaksud :

A. Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Tahun 2022 :

1. Hasil Penilaian AKIP per komponen :
 - a) Aspek Perencanaan Kinerja mendapat nilai 20,98 dari nilai maksimal 30.
 - b) Aspek Pengukuran Kinerja mendapat nilai 18,43 dari nilai maksimal sebesar 30.
 - c) Aspek Pelaporan Kinerja mendapat nilai 10,18 dari nilai maksimal 15.
 - d) Aspek Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal mendapat nilai 17,75 dari nilai maksimal 25.
2. Catatan atas Penilaian AKIP Tahun 2022 :
 - a) Monitoring dan evaluasi hasil rencana aksi kinerja yang telah ditetapkan agar dilakukan secara berkala dan seluruh proses monitoring didokumentasikan.
 - b) Memanfaat Teknologi Informasi
 - c) Menyusun Laporan Kinerja dengan sistematika penyusunan dan Penyajian Laporan Kinerja dan analisis capaian kinerja pada LAKIN harus sesuai dengan Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.
 - d) Menyempurnakan Mekanisme Pengumpulan Data Kinerja pada setiap Bidang melalui tahap verifikasi dan validasi untuk menjamin keakuratan data.

B. Tanggapan Atas Hasil Evaluasi AKIP Inspektorat Tahun 2022

Pada prinsipnya kami sependapat dengan Catatan Atas Penilaian AKIP Tahun 2022 dan akan ditindaklanjuti :

No	URAIAN	TINDAKLANJUT			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
1	Melakukan monitoring pencapaian kinerja secara periodik berdasarkan jadwal, mendokumentasikan hasil monitoring pencapaian kinerja, menindaklanjuti hasil monitoring pencapaian kinerja tersebut.	-	-	√	√
No	URAIAN	TINDAKLANJUT			
		Triwulan I	Triwulan II	Triwulan III	Triwulan IV
2	Koordinasi dengan Bappeda terkait Teknologi Informasi	-	-	√	-
3	Memperbaiki Penyusunan Lakin dan Sub. Analisis Capaian Kinerja sesuai dengan Permenpan RB 53 Tahun 2014.	-	-	√	-
4	Menyempurnakan Pengumpulan Data Kinerja setiap Bidang melalui tahap Verifikasi dan dan Validasi	-	-	√	√-

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

**KEPALA BADAN KESATUAN
BANGSA DAN POLITIK
KABUPATEN BANGKA**



**MOHD NURSI, S.IP
PEMBINA TK I, IV b
NIP. 19680602 198810 1001**

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN SASARAN MISI 4

"Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional"

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Kesadaran Politik Masyarakat

Persentase Cakupan Politik dan Organisasi Masyarakat

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Pendidikan Politik Masyarakat

Persentase Cakupan Pendidikan Politik Masyarakat

Meningkatnya Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Persentase Cakupan Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

SASARAN KEGIATAN

Terlaksananya Verifikasi Bantuan Hibah Papol dan Pembinaan Papol

Persentase Verifikasi Bantuan Hibah Papol dan Pembinaan Papol

Terlaksananya pendidikan Politik Masyarakat

Persentase pendidikan Politik Masyarakat

Terlaksananya Pembinaan dan pengawasan organisasi kemasyarakatan

Persentase Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan

SASARAN SUB KEGIATAN

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah/ rrvikasi

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/ Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik Di Daerah

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan Dibiidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah.

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas Pengawasan Ormas dan Ormas Asing Lainnya

LOGICAL FRAMEWORK, PENCAPAIAN SASARAN MISI 4

"Mewujudkan Gerbang Kota dan Pariwisata Berskala Internasional"

SASARAN STRATEGIS

Meningkatnya Wawasan Kebangsaan

Persentase Cakupan Wawasan Kebangsaan

SASARAN PROGRAM

Meningkatnya Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Persentase Cakupan Pemahaman Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Meningkatnya Pembinaan sosial dan budaya

Persentase Cakupan Ketahanan sosial dan budaya

Meningkatnya kewaspadaan Penanganan konflik sosial

Persentase Cakupan kewaspadaan Nasional dan Penanganan konflik sosial

SASARAN KEGIATAN

Terlaksananya pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Persentase pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan

Terlaksananya Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan

Persentase Pelaksanaan Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan

Terlaksananya Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

Persentase pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial

SASARAN SUB KEGIATAN

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika, dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Terlaksananya Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Terlaksananya Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bhineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Penyelenggaraan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah

Terlaksananya Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Terlaksananya Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Terlaksananya Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah

Terlaksananya Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota

Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota



PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA

BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. A. Yani (Jalur Dua) Sungailiat Telp (0717) 93296
E-mail : [Kesbangpol.bkg1 @ gmail.com](mailto:Kesbangpol.bkg1@gmail.com)/Website : [www. Bangka go.id](http://www.Bangka.go.id)

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

NOMOR : 188.4/ 17.a /BANKESBANGPOL/2021

TENTANG

PENETAPAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR DI LINGKUNGAN BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN BANGKA TAHUN 2021

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK,

- Menimbang : Menimbang bahwa dalam rangka menetapkan ukuran standar kinerja bagi pegawai dalam melaksanakan tugasnya, dan menjamin konsistensi pelayanan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka, maka perlu menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka;
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);

- Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817) ;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 18T, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bangka Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2009 Nomor 1 Sert D);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Sert D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 3 Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2019 Nomor 2 Seri D);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2023 (Lembarari Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 5 Seri D, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 14 Tahun 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2018 Nomor 9 Sert D);
 12. Peraturan Bupati Bangka Nomor 14 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyelenggaraan Pemerintahan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bangka (Berita Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2013 Nomor 16) ;
 13. Peraturan Bupati Bangka No. 40 tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021 (Berita Daerah tahun 2020 Nomor 42);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kabupaten Bangka);

MEMUTUSKAN :

- Kesatu : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik sebagaimana Diktum Kesatu yaitu SOP tentang Penyusunan Data Kinerja;
- Ketiga : Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud Diktum Kedua yang tercantum dalam lampiran keputusan ini wajib ditaati dan dilaksanakan oleh seluruh pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bangka.
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sungailiat

Pada tanggal 22 Januari 2021

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kabupaten Bangka,



Drs. M. DALYAN AMRIE
Pembina Utama Muda/IV/C
NIP. 19670427 198603 1 002

<p style="text-align: center;">PEMERINTAHAN KABUPATEN BANGKA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</p>	NOMOR SOP	: 476/ /BANKESBANGPOL/2021
	TGL. PEMBUATAN	: 22 Januari 2021
	TGL. REVISI	:
	TGL. EFEKTIF	: 01 Februari 2021
	DISAHKAN OLEH	:
	NAMA SOP	: PENYUSUNAN DATA KINERJA
DASAR HUKUM :		KUALIFIKASI PELAKSANA:
<ol style="list-style-type: none"> 1 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bangka (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Tahun 2016 Nomor 6 Seri D) 2 Permenpan dan RB Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan SOP AP 3 Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pembentukan Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik kabupaten Bangka 		<ol style="list-style-type: none"> 1 Memiliki kewenangan dalam menyusun data kinerja 2 Mengetahui tata cara pengumpulan data kinerja
KETERKAITAN		PERALATAN / PERLENGKAPAN
<ol style="list-style-type: none"> 1 SOP Penyusunan Buku Laporan Kinerja 		<ol style="list-style-type: none"> 1 Surat pengantar 2 Disposisi surat 2 Buku agenda 3 Tupoksi 4 Komputer 5 RKA OPD Tahun Anggaran 2020, RPJMD, Renstra OPD dan RKPD
PERINGATAN :		PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika Pengumpulan Data Kinerja tidak terselesaikan dengan baik dan benar maka kegiatan Penyusunan Kinerja akan terlambat.		<ol style="list-style-type: none"> 1. Disimpan sebagai data perencanaan Secara manual / elektronik

IDENTIFIKASI JUDUL SOP BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Instansi : Pemerintah Kabupaten Bangka
 Unit Kerja Eselon II : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Unit Kerja Eselon III : Sekretariat
 Unit Kerja Eselon IV : Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan

No	Tugas	Fungsi	Sub-Fungsi (Kegiatan)	Output	Aspek	Judul SOP
1	2	3	4	5	6	7
	Penyelenggaraan kesekretariatan meliputi pengelolaan urusan umum, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta perencanaan dan pelaporan	Mengkoordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran badan	Menyiapkan bahan dan pelaksanaan pengkoordinasian penyusunan dokumen perencanaan	Data Kinerja	Penyusunan	Penyusunan Data Kinerja

LEMBAR KERJA IDENTIFIKASI KEGIATAN

A. Data Kegiatan

1. Judul SOP	:	Penyusunan Data Kinerja
2. Jenis Kegiatan	:	Rutin
3. Penanggung Jawab	:	
a. Produk	:	Kaban
b. Kegiatan	:	Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan
4. Scope (Ruang Lingkup)	:	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

B. Identifikasi Kegiatan

Nama Kegiatan	:	Penyusunan Data Kinerja
Langkah Awal	:	Kepala Badan menugaskan Sekretaris untuk menyusun Data Kinerja lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Langkah Utama	:	Seluruh Bidang menghimpun data Kinerja di masing-masing bidang, menyerahkan format isian Kinerja beserta data pendukung penyusunan Data Kinerja dan menyerahkan kepada pengelola bahan perencanaan
Langkah Akhir	:	Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan menerima rekapitulasi data Kinerja

C. Identifikasi Langkah

Langkah Awal :	1	Kepala Badan menugaskan Sekretaris untuk menyusun Data Kinerja lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
	2	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik menindaklanjuti dan menugaskan Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan untuk mengumpulkan data awal Laporan Kinerja
	3	Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan menyusun personil tim penyusunan Data Kinerja, membuat jadwal kerja, membuat surat permintaan data Kinerja beserta format pengumpulan data dan mendistribusikan ke masing-masing bidang
Langkah Utama :	4	Seluruh Bidang menghimpun data Kinerja di masing-masing bidang, menyerahkan format isian Kinerja beserta data pendukung penyusunan Data Kinerja dan menyerahkan kepada pengelola bahan perencanaan
	5	Pengelola bahan perencanaan merekapitulasi seluruh data Kinerja dari masing-masing bagian dan menyerahkan kepada kasubbag perencanaan dan pelaporan
Langkah Akhir :	6	Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan menerima rekapitulasi data Kinerja

FLOWCHART Penyusunan Data Kinerja

NO	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA						MUTU BAKU		
		KEPALA BADAN KESBANGPOL	SEKRETARIS	KASUBBAG PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN	BIDANG	PENGELOLA BAHAN PERENCANAAN	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	KET
1	2	3	4	5	6		8	9	10	11
1	Menugaskan Sekretaris Badan Kesbangpol untuk menyusun Data Kinerja lingkup Badan Kesbangpol						Surat Edaran Penyusunan LAKIN, Renstra, RKPD, DPA	5 menit	Disposisi Kaban	
2	Menindaklanjuti dan menugaskan Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan untuk mengumpulkan data awal Laporan Kinerja						Disposisi Kadin, Surat Edaran Penyusunan LAKIN, Renstra, RKPD, DPA	5 menit	Disposisi Sekretaris	
3	Menyusun personil tim penyusunan data kinerja, membuat jadwal kerja, membuat surat permintaan data LAKIN beserta format pengumpulan data dan mendistribusikan ke masing-masing bidang						Surat Edaran Penyusunan LAKIN, Renstra, RKPD, DPA	1 hari	SK TIM Data Kinerja, jadwal kerja, surat permintaan data Kinerja, form isian data Kinerja	Terkait dengan SOP Penyusunan SKKa. Dinas/Bupati
4	Menghimpun data Kinerja di masing-masing bidang, menyerahkan format isian Data Kinerja beserta data pendukung penyusunan Data Kinerja dan menyerahkan kepada pengelola bahan perencanaan						SK TIM LAKIN, jadwal kerja, surat permintaan data LAKIN, form isian data LAKIN	3 hari	Data LAKIN Per Bidang	
5	Merekapitulasi seluruh data Kinerja dari masing-masing bagian dan menyerahkan kepada Kasubbag Program Anggaran dan Keuangan						Data LAKIN Per Bidang	2 hari	Rekapitulasi Data Kinerja Per Bidang	
6	Menerima rekapitulasi data Kinerja						Rekapitulasi Data LAKIN Per Bidang	1 jam	Rekapitulasi Data Kinerja Per Bidang	

LAPORAN FISIK DAN KEUANGAN BANKESBANGPOL 2023

Kode Rekening	Uraian	TARGET KINERJA DAN ANGGARAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2022		KONTRAK/SWAKELOLA					LOKASI	REALISASI				Ket
		TARGET	ANGGARAN	NILAI	NO/TGL	MULAI	SELESAI	PELAKSANA		FISIK (%)	KEU (Rp)	KEU (%)	SISA DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
5	BELANJA DAERAH		Rp23,317,317,557							87.92%	20,501,036,455	87.92%	2,816,281,102	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp23,232,216,566							87.92%	4,301,664,076	87.92%	18,930,552,490	
8.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		Rp3,068,149,360							82.12%	2,683,289,750	82.1%	384,859,610	
8.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp36,792,479							86.19%	25,800,000	85.3%	10,992,479	
8.01.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		10,000,000.00							85.31%	7,667,500	85.3%	2,332,500	
5.1	BELANJA OPERASI		10,000,000.00							80.02%	7,667,500	80.0%	2,332,500	
5.1.01	Belanja Pegawai		150,000.00							80.09%	150,000	80.1%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		150,000.00							80.56%	150,000	80.6%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		150,000.00							83.33%	150,000	83.3%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		150,000.00							100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp9,880,000							76.1%	7,517,500	76.1%	2,362,500	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp5,327,500							94.9%	5,057,500	94.9%	270,000	
	Belanja Jasa Kantor		Rp5,327,500							94.9%	5,057,500	94.9%	270,000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		Rp5,327,500							94.9%	5,057,500	94.9%	270,000	
	Belanja Perjalanan Dinas		Rp4,552,500							54.0%	2,460,000	54.0%	2,092,500	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp4,552,500							54.0%	2,460,000	54.0%	2,092,500	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp4,552,500							54.0%	2,460,000	54.0%	2,092,500	
8.01.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD		Rp5,000,000							96.9%	4,845,000	96.9%	155,000	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp5,000,000							96.9%	4,845,000	96.9%	155,000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp5,000,000							96.9%	4,845,000	96.9%	155,000	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp4,552,500							97.4%	4,435,000	97.4%	117,500	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp4,552,500							97.4%	4,435,000	97.4%	117,500	

5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		Rp4,552,500						97.4%	4,435,000	97.4%	117,500	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp447,500						91.6%	410,000	91.6%	37,500	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp447,500						91.6%	410,000	91.6%	37,500	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp447,500						91.6%	410,000	91.6%	37,500	
8.01.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD		Rp3,000,000						72.2%	2,165,000	72.2%	835,000	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp3,000,000						100.0%	2,165,000	100.0%	835,000	
5.1.01	Belanja Pegawai		150,000.00						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		150,000.00						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		150,000.00						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		150,000.00						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp2,850,000						70.7%	2,015,000	70.7%	835,000	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp2,030,000						99.3%	2,015,000	99.3%	15,000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp2,030,000						99.3%	2,015,000	99.3%	15,000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		Rp2,030,000						99.3%	2,015,000	99.3%	15,000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		820,000.00						0.0%	-	0.0%	820,000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		820,000.00						0.0%	-	0.0%	820,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		820,000.00						0.0%	-	0.0%	820,000	
8.01.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA- SKPD		Rp3,000,000						42.8%	1,285,000	42.8%	1,715,000	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp3,000,000						42.8%	1,285,000	42.8%	1,715,000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp3,000,000						42.8%	1,285,000	42.8%	1,715,000	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp1,360,000						94.5%	1,285,000	94.5%	75,000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp1,360,000						94.5%	1,285,000	94.5%	75,000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		Rp1,360,000						94.5%	1,285,000	94.5%	75,000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp1,640,000						0.0%	-	0.0%	1,640,000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp1,640,000						0.0%	-	0.0%	1,640,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Rp1,640,000						0.0%	-	0.0%	1,640,000	

8.01.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD		Rp3,000,000						45.0%	1,350,000	45.0%	1,650,000	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp3,000,000						45.0%	1,350,000	45.0%	1,650,000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp3,000,000						45.0%	1,350,000	45.0%	1,650,000	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp1,350,000						100.0%	1,350,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp1,350,000						100.0%	1,350,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		Rp1,350,000						100.0%	1,350,000	100.0%	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp1,650,000						0.0%	-	0.0%	1,650,000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp1,650,000						0.0%	-	0.0%	1,650,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp1,650,000						0.0%	-	0.0%	1,650,000	
8.01.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp8,792,479						72.0%	6,327,500	0%	2,464,979	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp8,792,479						100.0%	6,327,500	100.0%	2,464,979	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp8,792,479						100.0%	6,327,500	100.0%	2,464,979	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp3,457,500						100.0%	3,457,500	100.0%	-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp3,457,500						100.0%	3,457,500	100.0%	-	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		Rp3,457,500						100.0%	3,457,500	100.0%	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp5,334,979						53.8%	2,870,000	53.8%	2,464,979	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp5,334,979						53.8%	2,870,000	53.8%	2,464,979	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp5,334,979						53.8%	2,870,000	53.8%	2,464,979	
8.01.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp4,000,000						54.0%	2,160,000	54.0%	1,840,000	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp4,000,000						54.0%	2,160,000	54.0%	1,840,000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp4,000,000						54.0%	2,160,000	54.0%	1,840,000	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp1,937,500						26.8%	520,000	26.8%	1,417,500	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp1,937,500						26.8%	520,000	26.8%	1,417,500	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		Rp1,937,500						26.8%	520,000	26.8%	1,417,500	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp2,062,500						171.1%	1,640,000	171.1%	422,500	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp2,062,500						79.5%	1,640,000	79.5%	422,500	

5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp2,062,500							79.5%	1,640,000	79.5%	422,500	
8.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp2,191,574,976							84.9%	Rp1,861,390,371	84.9%	330,184,605	
8.01.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp2,149,695,893							84.8%	Rp1,822,208,353	84.8%	327,487,540	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp2,149,695,893							84.8%	Rp1,822,208,353	84.8%	327,487,540	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp2,149,695,893							84.8%	Rp1,822,208,353	84.8%	327,487,540	
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN		Rp1,428,375,893							89.1%	Rp1,273,363,353	89.1%	155,012,540	
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN		Rp993,130,090							95.3%	Rp946,184,361	95.3%	46,945,729	
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS		Rp993,130,090							95.9%	Rp952,665,109	95.9%	40,464,981	
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN		Rp85,793,784							89.7%	Rp76,990,668	89.7%	8,803,116	
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS		Rp85,793,784							89.9%	Rp77,128,773	89.9%	8,665,011	
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN		Rp117,611,500							99.9%	Rp117,490,000	99.9%	121,500	
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS		Rp117,611,500							99.9%	Rp117,490,000	99.9%	121,500	
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN		Rp70,488,000							0.0%	Rp0	0.0%	70,488,000	
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS		Rp70,488,000							0.0%	Rp0	0.0%	70,488,000	
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN		Rp18,165,125							91.6%	Rp16,360,000	91.6%	1,805,125	
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS		Rp18,165,125							91.6%	Rp16,645,000	91.6%	1,520,125	
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN		Rp49,964,099							91.2%	Rp45,552,180	91.2%	4,411,919	
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS		Rp49,964,099							91.6%	Rp45,769,440	91.6%	4,194,659	
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN		Rp12,644,762							57.3%	Rp7,242,498	57.3%	5,402,264	
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS		Rp12,644,762							57.3%	Rp7,242,498	57.3%	5,402,264	
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN		Rp111,148							12.3%	Rp13,638	12.3%	97,510	
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS		Rp111,148							12.4%	Rp13,825	12.4%	97,323	
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN		Rp71,457,224							78.2%	Rp55,885,698	78.2%	15,571,526	
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS		Rp71,457,224							78.2%	Rp55,885,698	78.2%	15,571,526	
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN		Rp2,429,717							78.7%	Rp1,911,066	78.7%	518,651	
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS		Rp2,429,717							78.7%	Rp1,911,066	78.7%	518,651	

5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN		Rp6,414,194						89.4%	Rp5,733,244	89.4%	680,950	
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS		Rp6,414,194						89.4%	Rp5,733,244	89.4%	680,950	
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN		Rp166,250						0.0%	Rp0	0.0%	166,250	
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS		Rp166,250						0.0%	Rp0	0.0%	166,250	
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN		Rp721.320.000						76.1%	548,845,000	76.1%	172,475,000	
5.1.01.02.05	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja ASN		Rp721.320.000						76.1%	548,845,000	-76.1%	172,475,000	
5.1.01.02.05.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Prestasi Kerja PNS		Rp721.320.000						76.1%	548,845,000	76.1%	172,475,000	
8.01.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD		Rp30,207,521						99.8%	30,142,018	99.8%	65,503	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp30,207,521						99.8%	30,142,018	99.8%	65,503	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp150,000						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp150,000						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp150,000						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp150,000						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp30,057,521						99.8%	29,992,018	99.8%	65,503	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp11,237,500						100.0%	11,232,500	100.0%	5,000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp11,237,500						100.0%	11,232,500	100.0%	5,000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		Rp11,237,500						100.0%	11,232,500	100.0%	5,000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp18,820,021						99.7%	18,759,518	99.7%	60,503	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp18,820,021						99.7%	18,759,518	99.7%	60,503	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp18,820,021						99.7%	18,759,518	99.7%	60,503	
8.01.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD		Rp5,000,000						47.6%	2,380,000	47.6%	2,620,000	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp5,000,000						47.6%	2,380,000	47.6%	2,620,000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp5,000,000						47.6%	2,380,000	47.6%	2,620,000	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp4,590,000						51.9%	2,380,000	51.9%	2,210,000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp4,590,000						51.9%	2,380,000	51.9%	2,210,000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		Rp4,590,000						51.9%	2,380,000	51.9%	2,210,000	

5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp410,000						0.0%	-	0.0%	410,000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp410,000						0.0%	-	0.0%	410,000	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp410,000						0.0%	-	0.0%	410,000	
8.01.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran SKPD		Rp6,671,562						99.8%	6,660,000	99.8%	11,562	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp6,671,562						99.8%	6,660,000	99.8%	11,562	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp6,671,562						99.8%	6,660,000	99.8%	11,562	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp6,670,000						99.9%	6,660,000	99.9%	10,000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp6,670,000						99.9%	6,660,000	99.9%	10,000	
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur		Rp6,670,000						99.9%	6,660,000	99.9%	10,000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp1,562						0.0%	-	0.0%	1,562	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp1,562						0.0%	-	0.0%	1,562	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp1,562						0.0%	-	0.0%	1,562	
8.01.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp20,377,360						100.0%	20,377,360	100.0%	-	
8.01.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp9,750,000						100.0%	9,750,000	100.0%	-	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp9,750,000						100.0%	9,750,000	100.0%	-	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp150,000						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp150,000						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp150,000						100.0%	150,000	100%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp150,000						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp9,600,000						100.0%	9,600,000	100.0%	-	
5.1.02.01	Belanja Barang		9,600,000						100.0%	9,600,000	100.0%	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		9,600,000						100.0%	9,600,000	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga		9,600,000						100.0%	9,600,000	100.0%	-	
8.01.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp10,627,360						100.0%	10,627,360	100.0%	-	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp10,627,360						100.0%	10,627,360	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp10,627,360						100.0%	10,627,360	100.0%	-	

5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp10,627,360						100.0%	10,627,360	100.0%	-	
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan		Rp10,627,360						100.0%	10,627,360	100.0%	-	
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis		Rp10,627,360						100.0%	10,627,360	100.0%	-	
8.01.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp295,911,966						89.7%	265,294,292	89.7%	30,617,674	
8.01.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		Rp238,868,646						87.2%	208,250,972	87.2%	30,617,674	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp238,868,646						87.2%	208,250,972	87.2%	30,617,674	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp690,000						100.0%	690,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp690,000						100.0%	690,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp690,000						100.0%	690,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp690,000						100.0%	690,000	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp238,178,646						87.1%	207,560,972	87.1%	30,617,674	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp238,178,646						87.1%	207,560,972	87.1%	30,617,674	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp238,178,646						87.1%	207,560,972	87.1%	30,617,674	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp228,178,646						89.2%	203,640,972	89.2%	24,537,674	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		10000000						39.2%	3,920,000	39.2%	6,080,000	
8.01.01.2.06.10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD		Rp28,521,660						100.0%	28,521,660	100.0%	-	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp28,521,660						100.0%	28,521,660	100.0%	-	
5.1.01	Belanja Pegawai		300000						100.0%	300,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		300000						100.0%	300,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		300000						100.0%	300,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		300000						100.0%	300,000	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp28,221,660						100.0%	28,221,660	100.0%	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp28,221,660						100.0%	28,221,660	100.0%	-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp25,350,000						100.0%	25,350,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		Rp25,350,000						100.0%	25,350,000	100.0%	-	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		Rp2,871,660						100.0%	2,871,660	100.0%	-	

5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		Rp1,671,660						100.0%	1,671,660	100.0%	-	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		Rp46,152						100.0%	46,152	100.0%	-	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN		Rp1,153,848						100.0%	1,153,848	100.0%	-	
8.01.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		Rp28,521,660						100.0%	28,521,660	100.0%	-	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp28,521,660						100.0%	28,521,660	100.0%	-	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp300,000.00						100.0%	300,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp300,000.00						100.0%	300,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp300,000.00						100.0%	300,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp300,000.00						100.0%	300,000	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp28,221,660						100.0%	28,221,660	100.0%	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp28,221,660						100.0%	28,221,660	100.0%	-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp25,350,000						100.0%	25,350,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		Rp25,350,000						100.0%	25,350,000	100.0%	-	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi		Rp2,871,660						100.0%	2,871,660	100.0%	-	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		Rp1,671,660						100.0%	1,671,660	100.0%	-	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		Rp46,152						100.0%	46,152	100.0%	-	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN		Rp1,153,848						100.0%	1,153,848	100.0%	-	
8.01.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Rp85,450,991						100.0%	85,450,000	100.0%	991	
8.01.01.2.07.05	Pengadaan Mebel		Rp32,900,000						100.0%	32,900,000	100.0%	-	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp150,000						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp150,000						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp150,000						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp150,000						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp150,000						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.2	BELANJA MODAL		Rp32,750,000						100.0%	32,750,000	100.0%	-	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp32,750,000						100.0%	32,750,000	100.0%	-	

5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		Rp32,750,000							100.0%	32,750,000	100.0%	-	
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor		Rp18,150,000							100.0%	18,150,000	100.0%	-	
5.2.02.05.01.0004	Belanja Modal Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor		Rp18,150,000							100.0%	18,150,000	100.0%	-	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		Rp14,600,000							100.0%	14,600,000	100.0%	-	
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel		Rp14,600,000							100.0%	14,600,000	100.0%	-	
8.01.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp52,550,991							100.0%	52,550,000	100.0%	991	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp200,000,000							100.0%	200,000	100.0%	-	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp200,000,000							100.0%	200,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp200,000,000							100%	200,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp200,000,000							100.0%	200,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp200,000,000							100.0%	200,000	100.0%	-	
5.2	BELANJA MODAL		Rp52,350,991							100.0%	52,350,000	100.0%	991	
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin		Rp52,350,991							100.0%	52,350,000	100.0%	991	
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga		Rp33,850,991							100.0%	33,850,000	100.0%	991	
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga		Rp33,850,991							100.0%	33,850,000	100.0%	991	
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin		Rp33,850,991							100.0%	33,850,000	100.0%	991	
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer		Rp18,500,000							100.0%	18,500,000	100.0%	-	
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer		Rp18,500,000							100.0%	18,500,000	100.0%	-	
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer		Rp18,500,000							100.0%	18,500,000	100.0%	-	
8.01.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp316,311,588							97.0%	306,715,859	97.0%	9,595,729	
8.01.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Rp215,488,545							98.8%	212,962,945	98.8%	2,525,600	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp215,488,545							98.8%	212,962,945	98.8%	2,525,600	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp690,000,000							100.0%	690,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp690,000,000							100.0%	690,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp690,000,000							100.0%	690,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp690,000,000							100.0%	690,000	100.0%	-	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp214,798,545						98.8%	212,272,945	98.8%	2,525,600	
5.1.02.01	Belanja Barang		Rp14,975,065						100.0%	14,974,465	100.0%	600	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		Rp14,975,065						100.0%	14,974,465	100.0%	600	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		Rp9,756,770						100.0%	9,756,770	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Rp2,579,895.00						100.0%	2,579,295	100.0%	600	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		Rp900,000.00						100.0%	900,000	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		Rp1,738,400.00						97.6%	1,738,400	97.6%	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp199,823,480						97.6%	197,298,480	97.6%	2,525,000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp179,490,000						97.6%	177,065,000	97.6%	2,425,000	
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi		Rp101,400,000						97.6%	98,975,000	97.6%	2,425,000	
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer		Rp76,050,000						100.0%	76,050,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah		Rp2,040,000						100.0%	2,040,000	100.0%	-	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		Rp20,333,480						99.5%	20,233,480	99.5%	100,000	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		Rp11,933,480						100.0%	11,933,480	100.0%	-	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		Rp323,064						98.8%	319,218	98.8%	3,846	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		Rp8,076,936						98.8%	7,980,782	98.8%	96,154	
8.01.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik		Rp38,143,789						82.9%	31,629,711	82.9%	6,514,078	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp38,143,789						82.9%	31,629,711	82.9%	6,514,078	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp450,000						100.0%	450,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp450,000						100.0%	450,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp450,000						100.0%	450,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp450,000						100.0%	450,000	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp37,693,789						78.4%	29,533,691	78.4%	8,160,098	
5.1.02.01	Belanja Barang		Rp1,693,789						97.2%	1,646,020	97.2%	47,769	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		Rp1,693,789						97.2%	1,646,020	97.2%	47,769	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik		Rp1,693,789						97.2%	1,646,020	97.2%	47,769	

5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp36,000,000						86.0%	29,533,691	86.0%	6,466,309	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp36,000,000						86.0%	29,533,691	86.0%	6,466,309	
5.1.02.02.01.0059	Belanja Tagihan Telepon		Rp9,000,000						86.0%	8,178,064	86.0%	821,936	
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air		Rp1,596,960						86.0%	1,373,940	86.0%	223,020	
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik		Rp25,403,040						78.7%	19,981,687	78.7%	5,421,353	
8.01.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor		Rp62,679,254						99.1%	62,123,203	99.1%	556,051	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp62,679,254						99.1%	62,123,203	99.1%	556,051	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp600,000.00						100.0%	600,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp600,000.00						100.0%	600,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp600,000.00						100.0%	600,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp600,000.00						100.0%	600,000	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp62,079,254						99.1%	61,523,203	99.1%	556,051	
5.1.02.01	Belanja Barang		Rp5,218,735						92.8%	4,840,969	92.8%	377,766	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		Rp5,218,735						92.8%	4,840,969	92.8%	377,766	
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia		Rp579,600						100.0%	579,600	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor		Rp4,639,135						91.9%	4,261,369	91.9%	377,766	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp56,860,519						99.7%	56,682,234	99.7%	178,285	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp51,478,285						99.7%	51,300,000	99.7%	178,285	
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan		25350000						100.0%	25,350,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01.0031	Belanja Jasa Tenaga Keamanan		25350000						100.0%	25,350,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01.0051	Belanja Jasa Pengolahan Sampah		Rp778,285						77.1%	600,000	77.1%	178,285	
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi		Rp5,382,234						100.0%	5,382,234	100.0%	-	
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		2,982,234						100.0%	2,982,234	100.0%	-	
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		92,304						100.0%	92,304	100.0%	-	
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN		2,307,696						100.0%	2,307,696	100.0%	-	
8.01.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Rp121,730,000						97.2%	118,261,868	97.2%	3,468,132	

8.01.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan		Rp87,960,000							99.6%	87,626,868	99.6%	333,132	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp87,960,000							99.6%	87,626,868	99.6%	333,132	
5.1.01	Belanja Pegawai		400000							100.0%	400,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		400000							100.0%	400,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		400000							100.0%	400,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		400000							100.0%	400,000	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp87,560,000							100.0%	87,226,868	100.0%	333,132	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp29,430,000							99.7%	29,333,114	99.7%	96,886	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp26,550,000							100.0%	26,550,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01.0033	Belanja Jasa Tenaga Supir		Rp26,550,000							100.0%	26,550,000	100.0%	-	
5.1.02.02.02	Belanja luran Jaminan/Asuransi		Rp2,880,000							96.6%	2,783,114	96.6%	96,886	
5.1.02.02.02.0005	Belanja luran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN		Rp1,680,000							100.0%	1,679,268	100.0%	732	
5.1.02.02.02.0006	Belanja luran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN		Rp46,152							91.7%	42,306	91.7%	3,846	
5.1.02.02.02.0007	Belanja luran Jaminan Kematian bagi Non ASN		Rp1,153,848							92.0%	1,061,540	92.0%	92,308	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		Rp50,130,000							99.5%	49,893,754	99.5%	236,246	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Rp50,130,000							99.5%	49,893,754	99.5%	236,246	
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan		Rp30,130,000							100.0%	30,130,000	100.0%	-	
5.1.02.03.02.0036	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang		Rp20,000,000							98.8%	19,763,754	98.8%	236,246	
8.01.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya		Rp8,770,000							70.0%	6,135,000	70.0%	2,635,000	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp8,770,000							70.0%	6,135,000	70.0%	2,635,000	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp150,000							100.0%	150,000	100.0%	-	

5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp8,620,000							69.4%	5,985,000	69.4%	2,635,000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		Rp8,600,000							69.6%	5,985,000	69.6%	2,615,000	
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin		Rp8,600,000							69.6%	5,985,000	69.6%	2,615,000	
5.1.02.03.02.0411	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya		Rp8,600,000							69.6%	5,985,000	69.6%	2,615,000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp20,000							0.0%	-	0.0%	20,000	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp20,000							0.0%	-	0.0%	20,000	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Rp20,000							0.0%	-	0.0%	20,000	
8.01.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Rp25,000,000							98.0%	24,500,000	98.0%	500,000	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp25,000,000							98.0%	24,500,000	98.0%	500,000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp25,000,000							98.0%	24,500,000	98.0%	500,000	
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan		Rp25,000,000							98.0%	24,500,000	98.0%	500,000	
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan		Rp25,000,000							98.0%	24,500,000	98.0%	500,000	
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor		Rp25,000,000							98.0%	24,500,000	98.0%	500,000	
8.01.02	PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		Rp1,447,262,900							96.0%	1,389,350,767	96.0%	57,912,133	
8.01.02.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan		Rp1,447,262,900							96.0%	1,389,350,767	96.0%	57,912,133	
8.01.02.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah		Rp1,407,262,900							98.7%	1,389,350,767	98.7%	17,912,133	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp1,407,262,900							98.7%	1,389,350,767	98.7%	17,912,133	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp960,000							100.0%	960,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp960,000							100.0%	960,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp960,000							100.0%	960,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp960,000							100.0%	960,000	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp1,406,302,900						-	98.7%	1,388,390,767	98.7%	17,912,133	
5.1.02.01	Belanja Barang		Rp557,628,970							97.9%	546,032,180	97.9%	11,596,790	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		Rp557,628,970							97.9%	546,032,180	97.9%	11,596,790	

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		Rp10,044,950							96.0%	9,645,950	96.0%	399,000	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Rp915,000							100.0%	915,000	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Benda Pos		Rp200,000							100.0%	200,000	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		Rp1,398,500							100.0%	1,398,500	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perabot Kantor		Rp1,008,000							#VALUE!	1,008,000	#VALUE!	#VALUE!	
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Listrik		Rp168,000							#VALUE!	-	#VALUE!	#VALUE!	
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya		Rp1,701,200							100.0%	1,701,200	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0037	Belanja Obat-Obatan-Obat		Rp539,460							100.0%	539,460	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0038	Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya		Rp2,952,600							100.0%	2,952,600	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0039	Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat		Rp33,624,100							100.0%	33,624,100	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Rp5,550,000							90.2%	5,007,000	90.2%	543,000	
5.1.02.01.01.0058	Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan		Rp317,003,500							96.5%	306,038,000	96.5%	10,965,500	
5.1.02.01.01.0066	Belanja Pakaian Dinas Upacara (PDU)		Rp89,528,160							100.0%	89,528,160	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0075	Belanja Pakaian Batik Tradisional		Rp7,750,000							100.0%	7,750,000	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga		Rp85,413,500							99.9%	85,314,210	99.9%	99,290	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp265,490,000							99.9%	265,190,000	99.9%	300,000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp116,190,000							100.0%	116,190,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		Rp20,400,000							100.0%	20,400,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		Rp42,040,000							#VALUE!	42,040,000	#VALUE!	#VALUE!	
5.1.02.02.01.0006	Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan		Rp5,000,000							100.0%	5,000,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01.0014	Belanja Jasa Tenaga Kesehatan		Rp5,500,000							100.0%	5,500,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01.0025	Belanja Jasa Tenaga Kesenian dan Kebudayaan		2000000							100.0%	2,000,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli		Rp41,250,000							100.0%	41,250,000	100.0%	-	
5.1.02.02.04	Belanja Sewa Peralatan dan Mesin		Rp24,700,000							100.0%	24,700,000	100.0%	-	
5.1.02.02.04.0036	Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang		Rp23,800,000							100.0%	23,800,000	100.0%	-	
5.1.02.02.04.0128	Belanja Sewa Kursi Rapat Pejabat		Rp900,000							100.0%	900,000	100.0%	-	

5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		Rp124,600,000							99.8%	124,300,000	99.8%	300,000	
5.1.02.02.06	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pendidikan		Rp9,000,000							96.7%	8,700,000	96.7%	300,000	
5.1.02.02.05.0025	Belanja Sewa Bangunan Terbuka		Rp4,500,000							100.0%	4,500,000	100.0%	-	
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel		Rp111,100,000							100.0%	111,100,000	100.0%	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp493,658,930							98.9%	488,053,587	98.9%	5,605,343	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		493,658,930							98.9%	488,053,587	98.9%	5,605,343	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp491,158,930							98.9%	485,553,587	98.9%	5,605,343	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Rp2,500,000							100.0%	2,500,000	100.0%	-	
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		Rp89,525,000							100.0%	89,525,000	100.0%	-	
5.1.02.05.02	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat		Rp89,525,000							100.0%	89,525,000	100.0%	-	
5.1.02.05.02.0001	Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain		Rp89,525,000							100.0%	89,525,000	100.0%	-	
8.01.02.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan		Rp40.000.000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp40.000.000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp150.000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp150.000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp150.000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp150.000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp39.850.000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.02.01	Belanja Barang		Rp10.816.685							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		Rp10.816.685							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		Rp3.702.020							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Rp318.150							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		Rp781.515							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Rp6.015.000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp12.450.000							0.0%	-	0.0%	-	

5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp4.450.000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		Rp4.450.000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan		Rp8.000.000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.02.02.05.0009	Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan		Rp8.000.000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp16.583.315							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp16.583.315							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp15.000.000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Rp1.583.315							0.0%	-	0.0%	-	
8.01.03	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA		Rp18,449,903,722							87.5%	16,141,517,483	87.5%	2,308,386,239	
8.01.03.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi		Rp18,449,903,722							87.5%	16,141,517,483	87.5%	2,308,386,239	
8.01.03.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Rp18,315,641,272							87.6%	16,037,956,183	87.6%	2,277,685,089	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp18,315,641,272							87.6%	16,037,956,183	87.6%	2,277,685,089	
5.1.01	Belanja Pegawai		670000							100.0%	670,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		670000							100.0%	670,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		670000							100.0%	670,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		670000							100.0%	670,000	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp49,696,639							86.7%	43,110,350	86.7%	6,586,289	
5.1.02.01	Belanja Barang		Rp18,856,570							82.1%	15,480,350	82.1%	3,376,220	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		Rp18,856,570							82.1%	15,480,350	82.1%	3,376,220	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		Rp7,953,820							57.6%	4,577,600	57.6%	3,376,220	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Rp906,750							100.0%	906,750	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		Rp1,804,000							100.0%	1,804,000	100.0%	-	

5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Rp8,192,000						100.0%	8,192,000	100.0%	-	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp18,250,000						100.0%	18,250,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp18,250,000						100.0%	18,250,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		Rp8,400,000						100.0%	8,400,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		9850000						100.0%	9,850,000	100.0%	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp 12,590,069						74.5%	9,380,000	74.5%	3,210,069	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp 12,590,069						74.5%	9,380,000	74.5%	3,210,069	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp 10,565,930						69.8%	7,380,000	69.8%	3,185,930	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Rp 2,024,139						98.8%	2,000,000	98.8%	24,139	
5.1.05	Belanja Hibah		Rp18,265,274,633						87.6%	15,994,175,833	87.6%	2,271,098,800	
5.1.05.02	Belanja Hibah kepada Pemerintah Daerah Lainnya		Rp17,314,119,200						86.9%	15,043,020,400	86.9%	2,271,098,800	
5.1.05.02.01	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya		Rp17,314,119,200						86.9%	15,043,020,400	86.9%	2,271,098,800	
5.1.05.02.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Pemerintah Daerah Lainnya		Rp17,314,119,200						86.9%	15,043,020,400	86.9%	2,271,098,800	
5.1.05.07	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		Rp951,155,433						100.0%	951,155,433	100.0%	-	
5.1.05.07.01	Belanja Hibah Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		Rp951,155,433						100.0%	951,155,433	100.0%	-	
5.1.05.07.01.0001	Belanja Hibah berupa Bantuan Keuangan kepada Partai Politik		Rp951,155,433						100.0%	951,155,433	100.0%	-	
8.01.03.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah		Rp134,262,450						77.1%	103,561,300	77.1%	30,701,150	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp134,262,450						77.0%	103,361,300	0.0%	30,901,150	
5.1.01	Belanja Pegawai		200000						100.0%	200,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		200000						100.0%	200,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		200000						100.0%	200,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		200000						100.0%	200,000	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp134,062,450						77.1%	103,361,300	77.1%	30,701,150	

5.1.02.01	Belanja Barang		Rp6,062,500						91.3%	5,535,825	91.3%	526,675	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		Rp6,062,500						91.3%	5,535,825	91.3%	526,675	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		Rp2,050,450						81.9%	1,679,875	81.9%	370,575	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Rp636,300						95.1%	604,950	95.1%	31,350	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		Rp3,375,750						96.3%	3,251,000	96.3%	124,750	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp8,250,000						100.0%	8,250,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp8,250,000						100.0%	8,250,000	100.0%	-	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		Rp8,250,000						100.0%	8,250,000	100.0%	-	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp119,749,950						74.8%	89,575,475	74.8%	30,174,475	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp119,749,950						74.8%	89,575,475	74.8%	30,174,475	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp106,250,000.00						80.8%	85,800,475	80.8%	20,449,525	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Rp13,499,950						28.0%	3,775,000	28.0%	9,724,950	
8.01.04	PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN		Rp15,000,000						60.2%	9,031,855	60.2%	5,968,145	
8.01.04.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan		Rp15,000,000						60.2%	9,031,855	60.2%	5,968,145	
8.01.04.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah		Rp15,000,000						60.2%	9,031,855	60.2%	5,968,145	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp15,000,000						60.2%	9,031,855	60.2%	5,968,145	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp150,000.00						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp150,000.00						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp150,000.00						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp150,000.00						100.0%	150,000	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp14,850,000						59.8%	8,881,855	59.8%	5,968,145	
5.1.02.01	Belanja Barang		Rp2,630,570						85.0%	2,236,855	85.0%	393,715	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		Rp2,630,570						85.0%	2,236,855	85.0%	393,715	

5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		Rp1,998,050							81.1%	1,619,875	81.1%	378,175	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Rp254,520							95.1%	241,980	95.1%	12,540	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		Rp378,000							99.2%	375,000	99.2%	3,000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp12,219,430							54.4%	6,645,000	54.4%	5,574,430	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp12,219,430							54.4%	6,645,000	54.4%	5,574,430	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp5,719,280							86.0%	4,920,000	86.0%	799,280	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Rp6,500,150							26.5%	1,725,000	26.5%	4,775,150	
8.01.05	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Rp179,116,725							97.8%	175,146,080	97.8%	3,970,645	
8.01.05.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya		Rp179,116,725							97.8%	175,146,080	97.8%	3,970,645	
8.01.05.2.01.03	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah		Rp179,116,725							97.8%	175,146,080	97.8%	3,970,645	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp179,116,725							97.8%	175,146,080	97.8%	3,970,645	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp460,000							0.0%	-	0.0%	460,000	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp460,000							0.0%	-	0.0%	460,000	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp460,000							0.0%	-	0.0%	460,000	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp460,000							0.0%	-	0.0%	460,000	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp28,656,725							87.7%	25,146,080	87.7%	3,510,645	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp28,656,725							87.7%	25,146,080	87.7%	3,510,645	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp28,656,725							87.7%	25,146,080	87.7%	3,510,645	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp24,784,145							93.0%	23,046,080	93.0%	1,738,065	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		3872580							54.2%	2,100,000	54.2%	1,772,580	
5.1.05	Belanja Hibah		Rp150,000,000							100.0%	150,000,000	100.0%	-	
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia		Rp150,000,000							100.0%	150,000,000	100.0%	-	
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-		Rp150,000,000							100.0%	150,000,000	100.0%	-	

	Undangan													
5.1.05.05.01.0003	Belanja Hibah Jasa kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan		Rp150,000,000							100.0%	150,000,000	100.0%	-	
8.01.06	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Rp157,884,850							65.0%	102,700,520	65.0%	55,184,330	
8.01.06.2.01	Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial		Rp157,884,850							65.0%	102,700,520	65.0%	55,184,330	
8.01.06.2.01.04	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Rp43,538,100							87.6%	38,119,340	87.6%	5,418,760	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp43,538,100							87.6%	38,119,340	87.6%	5,418,760	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp400,000.00							100.0%	400,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		400,000.00							100.0%	400,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		400,000.00							100.0%	400,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		400,000.00							100.0%	400,000	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp43,138,100							87.4%	37,719,340	87.4%	5,418,760	
5.1.02.01	Belanja Barang		Rp6,516,980							90.8%	5,916,980	90.8%	600,000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		Rp6,516,980							90.8%	5,916,980	90.8%	600,000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		Rp173,000							100.0%	173,000	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Rp241,980							100.0%	241,980	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		Rp302,000							100.0%	302,000	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Rp5,800,000							89.7%	5,200,000	89.7%	600,000	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp18,700,000							75.9%	14,200,000	75.9%	4,500,000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp18,700,000							75.9%	14,200,000	75.9%	4,500,000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		Rp18,700,000							75.9%	14,200,000	75.9%	4,500,000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp17,921,120							98.2%	17,602,360	98.2%	318,760	

5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp17,921,120							98.2%	17,602,360	98.2%	318,760	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp16,000,000							98.9%	15,827,360	98.9%	172,640	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Rp1,921,120							92.4%	1,775,000	92.4%	146,120	
8.01.06.2.01.05	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah		Rp70,220,930							84.5%	59,369,180	84.5%	10,851,750	
5.1	BELANJA OPERASI		Rp70,220,930							84.5%	59,369,180	84.5%	10,851,750	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp600,000							100.0%	600,000	100.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp600,000							100.0%	600,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp600,000							100.0%	600,000	100.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp600,000							100.0%	600,000	100.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp69,620,930							84.4%	58,769,180	84.4%	10,851,750	
5.1.02.01	Belanja Barang		Rp18,202,950							91.1%	16,582,950	91.1%	1,620,000	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		Rp18,202,950							91.1%	16,582,950	91.1%	1,620,000	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		Rp1,334,000							100.0%	1,334,000	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Rp604,950							100.0%	604,950	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		Rp604,000							100.0%	604,000	100.0%	-	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		15,660,000.00							89.7%	14,040,000	89.7%	1,620,000	
5.1.02.02	Belanja Jasa		19,700,000.00							97.5%	19,200,000	97.5%	500,000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		19,700,000.00							97.5%	19,200,000	97.5%	500,000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		19,700,000.00							97.5%	19,200,000	97.5%	500,000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp31,717,980							72.5%	22,986,230	72.5%	8,731,750	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp31,717,980							72.5%	22,986,230	72.5%	8,731,750	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp27,623,980							77.3%	21,361,230	77.3%	6,262,750	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Rp4,094,000							39.7%	1,625,000	39.7%	2,469,000	
8.01.06.2.01.06	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota		Rp44,125,820							11.8%	5,212,000	11.8%	38,913,820	

5.1	BELANJA OPERASI		Rp44,125,820							11.8%	5,212,000	11.8%	38,913,820	
5.1.01	Belanja Pegawai		Rp300,000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN		Rp300,000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium		Rp300,000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan		Rp300,000							0.0%	-	0.0%	-	
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa		Rp43,825,820							11.9%	5,212,000	11.9%	38,613,820	
5.1.02.01	Belanja Barang		Rp9,059,970							21.3%	1,932,000	21.3%	7,127,970	
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis		Rp9,059,970							21.3%	1,932,000	21.3%	7,127,970	
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Alat Tulis Kantor		Rp1,734,220							24.6%	426,000	24.6%	1,308,220	
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover		Rp610,000							98.4%	600,000	98.4%	10,000	
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Komputer		Rp915,750							98.9%	906,000	98.9%	9,750	
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat		Rp5,800,000							0.0%	-	0.0%	5,800,000	
5.1.02.02	Belanja Jasa		Rp20,820,000							0.0%	-	0.0%	20,820,000	
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor		Rp20,820,000							0.0%	-	0.0%	20,820,000	
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia		Rp2,800,000							0.0%	-	0.0%	2,800,000	
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan		Rp18,020,000							0.0%	-	0.0%	18,020,000	
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas		Rp13,945,850							23.5%	3,280,000	23.5%	10,665,850	
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri		Rp13,945,850							23.5%	3,280,000	23.5%	10,665,850	
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa		Rp7,964,100							41.2%	3,280,000	41.2%	4,684,100	
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota		Rp5,981,750							0.0%	-	0.0%	5,981,750	
JUMLAH			Rp23,317,317,557							87.92%	Rp20,501,036,455	87.92%	2,816,281,102	

Sungai

